



RENCANA KERJA 2021

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA



WALI KOTA BOGOR
PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN WALI KOTA BOGOR
NOMOR 103 TAHUN 2020
TENTANG
RENCANA KERJA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KOTA BOGOR TAHUN 2021
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BOGOR,

- Menimbang : a. bahwa Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Bogor Tahun 2021 telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 62 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Bogor Tahun 2021;
- b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 142 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, penetapan Renja Perangkat Daerah paling lambat 1 (satu) bulan Perkada tentang RKPD ditetapkan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bogor Tahun 2021;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042).
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322).

10. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323).
11. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
12. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2019 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 590);

19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 8 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 45) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 236);
20. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 8 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 237);
21. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 59 Tahun 2020 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2021 (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2020 Nomor 59);
22. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2008 Nomor 1 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 2 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2010 Nomor 1 Seri E);
23. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 7 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2009 Nomor 3 Seri E); .
24. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 8 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bogor Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2011 Nomor 2 Seri E);
25. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bogor (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2016 Nomor 1 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bogor (Lembaran Daerah Kota Bogor tahun 2019 Nomor 1 Seri D);

26. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 8 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2017 Nomor 5 Seri E);
27. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 14 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bogor Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kota Bogor tahun 2019 Nomor 11 Seri E);
28. Peraturan Walikota Bogor Nomor 63 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Dinas Komunikasi, Informasi, Statistik Dan Persandian (Berita Daerah Kota Bogor Tahun 2019 Nomor 57 Seri E);
29. Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 62 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Bogor Tahun 2021 (Berita Daerah Kota Bogor Tahun 2020 Nomor 50 Seri E);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG RENCANA KERJA DINAS KOMUNIKASI, INFORMASI, STATISTIK DAN PERSANDIAN KOTA BOGOR TAHUN 2021.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota adalah Daerah Kota Bogor.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Bogor.
4. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah Kota Bogor untuk periode 1 (satu) tahun.
5. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Bogor untuk periode 5 (lima) tahun.
6. Rencana Kerja Tahunan Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah Kota Bogor untuk periode 1 (satu) tahun.
7. Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut RKA Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program dan kegiatan suatu Perangkat Daerah, serta Pagu Anggaran Sementara yang didasarkan atas Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS).
8. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

9. Kepala Perangkat Daerah adalah Kepala Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Bogor.
10. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Bappeda adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bogor.
11. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Kepala Bappeda adalah Kepala Bappeda Kota Bogor.

BAB II KEDUDUKAN, MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Kedudukan Renja Perangkat Daerah merupakan:
 - a. dokumen perencanaan kerja perangkat daerah untuk periode tahun 2021 yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2021 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2021;
 - b. penjabaran dari RKPD Kota Bogor tahun 2021 yang memuat tujuan, sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Perangkat daerah dengan indikator kinerja yang terukur pada setiap rencana kerja dan pendanaannya.
- (2) Maksud penyusunan Renja Perangkat Daerah adalah sebagai pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun RKA Perangkat Daerah
- (3) Tujuan penetapan Renja Perangkat Daerah adalah untuk:
 - a. mewujudkan pencapaian target kinerja perangkat daerah yang mendukung visi dan misi daerah;
 - b. mewujudkan integrasi, sinkronisasi dan sinergitas pembangunan baik antar sektor, antar ruang, antar waktu dan antar pemangku kepentingan;
 - c. mewujudkan keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan;
 - d. mengoptimalkan partisipasi masyarakat;
 - e. mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya secara efisien, efektif berkeadilan dan berkelanjutan.

BAB III SISTEMATIKA PENYUSUNAN DOKUMEN RKPD TAHUN 2021

Pasal 3

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

3.2. Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah

3.3. Program dan Kegiatan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V PENUTUP

BAB IV PERUBAHAN RENJA PERANGKAT DAERAH

Pasal 4

- (1) Renja Perangkat Daerah dapat diubah dalam hal terjadi perubahan RKPD Kota Bogor yang dikarenakan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan dalam tahun berjalan.
- (2) Perkembangan dalam tahun berjalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seperti:
 - a. perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan Daerah, kerangka ekonomi Daerah dan keuangan Daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan; dan/atau
 - b. saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan; dan/atau
 - c. keadaan darurat dan keadaan luar biasa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

Perubahan Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota.

BAB V PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 6

Mekanisme pengendalian dan evaluasi dalam pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

- a. Kepala Perangkat Daerah melakukan pemantauan terhadap rencana kerja perangkat daerah;
- b. Kepala Bappeda menghimpun dan menganalisis hasil pemantauan pelaksanaan rencana dari masing-masing Perangkat Daerah;
- c. Kepala Perangkat Daerah melakukan evaluasi kinerja pelaksanaan rencana kerja tahun sebelumnya;
- d. Kepala Bappeda menyusun evaluasi rencana pembangunan berdasarkan hasil evaluasi rencana kerja Perangkat Daerah;
- e. hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada huruf d menjadi bahan bagi penyusunan RKPD dan renja perangkat daerah tahun berikutnya.

**BAB VI
PENUTUP**

Pasal 7

Uraian lebih lanjut mengenai dokumen Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 8

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bogor.

Ditetapkan di Bogor
pada tanggal 27 Agustus 2020



Diundangkan di Bogor
pada tanggal 27 Agustus 2020



BERITA DAERAH KOTA BOGOR
TAHUN 2020 NOMOR 89 SERI E

LAMPIRAN PERATURAN WALI KOTA BOGOR

NOMOR : 103

TANGGAL : 27 Agustus 2020

TENTANG : RENCANA KERJA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KOTA BOGOR TAHUN 2021

BAB I
PENDAHULUAN

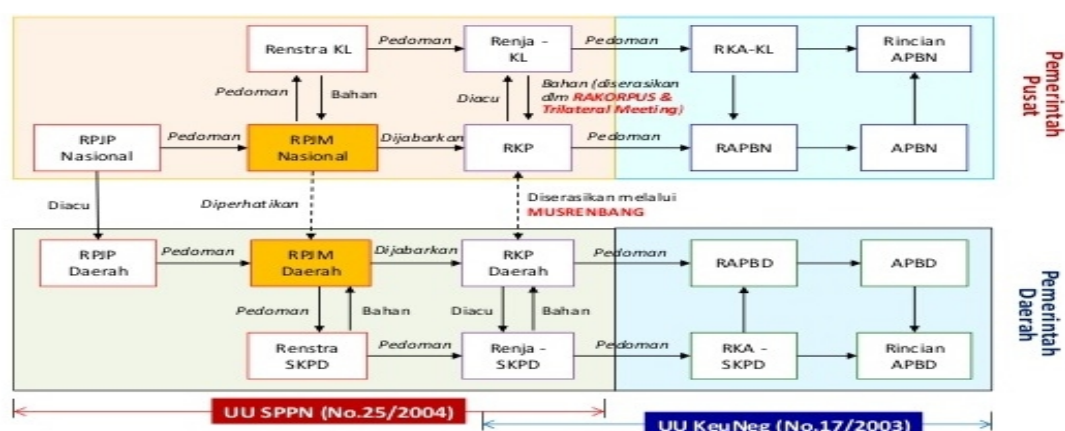
1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja (Renja) Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Bogor Kota Bogor Tahun 2021 merupakan dokumen perencanaan Dinas untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh dinas maupun dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Penyusunan Renja Diskominfo Kota Bogor Tahun 2021 merupakan upaya untuk mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang sinergis antara perencanaan pembangunan nasional dengan perencanaan pembangunan provinsi. Oleh karena itu substansi Renja harus selaras dengan dokumen perencanaan tingkat pusat dan dokumen perencanaan tingkat provinsi, serta mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Bogor.

Penyusunan Renja Diskominfo Kota Bogor Tahun 2021 mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Bogor tahun 2021 dan merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Diskominfo Kota Bogor Tahun 2019-2024, yang tentunya mendukung Visi dan Misi Wali Kota Bogor sebagaimana dijabarkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2019-2024.

Keterkaitan Renja Diskominfo Kota Bogor Tahun 2021 dengan dokumen perencanaan lain dapat dilihat pada gambar dibawah ini.



Gambar 1.1
Keterkaitan Antar Dokumen Perencanaan

Rancangan Renja disusun dengan mengacu pada rancangan awal RKPD, Renstra Perangkat Daerah, hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya, masalah yang dihadapi, dan usulan program serta kegiatan yang berasal dari masyarakat. Rancangan Renja Perangkat Daerah memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Program dan kegiatan serta pendanaan dalam Renja 2021 disusun berdasarkan:

- a. pendekatan kinerja, kerangka pengeluaran jangka menengah serta perencanaan dan penganggaran terpadu;
- b. kerangka pendanaan dan pagu indikatif;
- c. program prioritas yang tertuang dalam Misi II Kota Bogor yaitu Mewujudkan Kota Bogor Yang Cerdas.

Selanjutnya Renja Diskominfo Kota Bogor tahun 2021 ini akan menjadi bahan penyusunan Rencana Kerja Anggaran dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Diskominfo Kota Bogor tahun 2021, serta menjadi pedoman dan acuan dalam melaksanakan program dan kegiatan selama tahun 2021 dan selanjutnya akan dievaluasi melalui penilaian terhadap realisasi Dokumen Pelaksanaan Anggaran Diskominfo Kota Bogor untuk mengetahui realisasi pencapaian target indikator kinerja, dan penyerapan anggaran.

1.2. Landasan Hukum

Dasar Hukum penyusunan Renja Diskominfo Kota Bogor Tahun 2021:

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang I.6 Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 09 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
11. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
12. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2019 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020;
19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 7 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 236);
20. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 8 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 237);
21. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 59 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2021 (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2020 Nomor 59);
22. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 2 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2010 Nomor 1 Seri E);
23. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 7 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2009 Nomor 3 Seri E);
24. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bogor (Lembaran Daerah Kota Bogor tahun 2016 Nomor 1 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bogor (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2019 Nomor 1 Seri D);

25. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 14 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bogor Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kota Bogor tahun 2019 Nomor 11 Seri E);
26. Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 62 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Bogor Tahun 2021 (Berita Daerah Kota Bogor Tahun 2020 Nomor 50 Seri E);
27. Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 63 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika (Berita Daerah Kota Bogor Tahun 2019 Nomor 57 Seri E).

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Penyusunan Renja Diskominfo Kota Bogor tahun 2021 dimaksudkan sebagai bahan acuan atau dasar pelaksanaan kegiatan Tahun Anggaran 2021 pada Diskominfo Kota Bogor.

Sedangkan tujuan penyusunan Renja Diskominfo Kota Bogor tahun 2021 adalah sebagai tolak ukur kinerja aparat Diskominfo Kota Bogor dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya untuk kurun waktu 1 (satu) Tahun Anggaran (periode 1 Januari 2021 – 31 Desember 2021).

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Renja Diskominfo Kota Bogor Tahun 2021 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, Bab ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja Diskominfo Kota Bogor yang meliputi latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

Bab II Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah, Bab ini memuat informasi evaluasi pelaksanaan Renja Diskominfo Kota Bogor tahun lalu dan capaian Renstra Diskominfo, Analisis kinerja pelayanan Diskominfo, Isu-isu strategis penyelenggaraan tugas dan fungsi Diskominfo Kota Bogor, Reviu terhadap rancangan awal dan penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat.

Bab III Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan, Bab ini terdiri dari beberapa bagian pembahasan yaitu telaahan terhadap kebijakan nasional, tujuan dan sasaran Renja Diskominfo Kota Bogor, serta perencanaan program dan kegiatan Diskominfo Kota Bogor.

Bab VI Rencana Kerja Dan Pendanaan Perangkat Daerah

Bab V Penutup, Bab ini berisi harapan dan komitmen merealisasikan Renja, kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.

BAB II
HASIL EVALUASI RENJA
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA BOGOR
TAHUN 2019

2.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA BOGOR TAHUN 2019 DAN CAPAIAN RENSTRA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA BOGOR

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap kegiatan pada Tahun 2019, Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bogor secara umum telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan Rencana Kerja, dengan hasil capaian akhir kegiatan “baik” dengan tingkat capaian rata-rata sebesar 96,21% (sembilan puluh enam koma dua puluh satu persen).

Realisasi Belanja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bogor berdasarkan APBD dan APBD-P Tahun Anggaran 2019 dengan capaian sebesar Rp17.693.168.805,00 (tujuh belas milyar enam ratus sembilan puluh tiga juta seratus enam puluh delapan ribu delapan ratus lima rupiah) atau 96,21% (sembilan puluh enam koma dua puluh satu persen) dari yang dianggarkan sebesar Rp18.390.826.293,00 (delapan belas milyar tiga ratus sembilan puluh juta delapan ratus dua puluh enam ribu dua ratus sembilan puluh tiga rupiah). Komponen Belanja Daerah antara lain Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung dengan penjelasan sebagai berikut:

a. Belanja Tidak Langsung

Realisasi Belanja Tidak Langsung tahun 2019 mencapai Rp7.952.944.046,00 (tujuh milyar sembilan ratus lima puluh dua juta sembilan ratus empat puluh empat ribu empat puluh enam rupiah) atau 93,34% (sembilan puluh tiga koma tiga puluh empat persen) dari yang dianggarkan sebesar Rp 8.520.586.704,00 (delapan milyar lima ratus dua puluh juta lima ratus delapan puluh enam ribu tujuh ratus empat rupiah).

b. Belanja Langsung

Realisasi belanja langsung tahun 2019 sebesar Rp9.740.224.759,00 (sembilan milyar tujuh ratus empat puluh juta dua ratus dua puluh empat ribu tujuh ratus lima puluh sembilan rupiah) atau 98,68% (sembilan puluh delapan koma

enam delapan persen) 98,68% (sembilan puluh delapan koma enam delapan persen) dari yang dianggarkan sebesar Rp9.870.239.589,00 (sembilan milyar delapan ratus tujuh puluh juta dua ratus tiga puluh sembilan ribu lima ratus delapan puluh sembilan rupiah).

Belanja Langsung merupakan belanja yang dianggarkan terkait langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan.

Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan:

a) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

terdiri dari 1 (satu) kegiatan yaitu Pengelolaan Rumah Tangga OPD dari rencana anggaran

Rp885.502.579,00 (delapan ratus delapan puluh lima juta lima ratus dua ribu lima ratus tujuh puluh sembilan rupiah) realisasi keuangannya mencapai Rp864.661.028,00 (delapan ratus enam puluh empat juta enam ratus enam puluh satu ribu dua puluh delapan rupiah) atau sebesar 97,65% (sembilan puluh tujuh koma enam lima persen).

b) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

terdiri dari 2 (dua) kegiatan dengan rincian sebagai berikut:

1. Pemeliharaan Rutin/Berkala Inventaris Kantor dari rencana anggaran Rp73.353.000,00 (tujuh puluh tiga juta tiga ratus lima puluh tiga ribu rupiah) dengan realisasi keuangannya mencapai Rp70.493.151,00 (tujuh puluh juta empat ratus sembilan puluh tiga ribu seratus lima puluh satu rupiah) atau sebesar 96,1% (Sembilan puluh enam koma satu persen).
2. Pengadaan Inventaris Kantor dari rencana anggaran sebesar Rp335.950.000,00 (tiga ratus tiga puluh lima juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dengan realisasi keuangannya mencapai Rp333.754.848,00 (tiga ratus tiga puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh empat ribu delapan ratus empat puluh delapan rupiah) atau sebesar 99,35% (sembilan puluh sembilan koma tiga lima persen).

c) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

terdiri dari 1 (satu) kegiatan yaitu Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan PD dari rencana anggaran sebesar Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) terealisasi mencapai Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) atau sebesar 100% (seratus persen).

d) Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa

terdiri dari 29 (dua puluh sembilan) kegiatan dengan rincian sebagai berikut:

1. Pengadaan BANDWIDTH dari rencana anggaran sebesar Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) terealisasi Rp2.499.990.000,00 (dua milyar empat ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah) atau sebesar 99,99% (sembilan puluh sembilan koma sembilan sembilan persen);
2. Pemeliharaan jaringan intranet dan internet (BACKBONE) Kota Bogor dari rencana anggaran sebesar Rp669.936.800,00 (enam ratus enam puluh sembilan juta sembilan ratus tiga puluh enam ribu delapan ratus rupiah) dengan realisasi keuangannya mencapai Rp666.657.800,00 (enam ratus enam puluh enam juta enam ratus lima puluh tujuh ribu delapan ratus rupiah) atau sebesar 99,51% (sembilan puluh sembilan koma lima satu persen);
3. Pengembangan Infrastruktur Jaringan Kota dari rencana anggaran sebesar Rp772.327.400,00 (tujuh ratus tujuh puluh dua juta tiga ratus dua puluh tujuh ribu empat ratus rupiah) dengan realisasi keuangannya mencapai Rp766.861.650,00 (tujuh ratus enam puluh enam juta delapan ratus enam puluh satu ribu enam ratus lima puluh rupiah) atau sebesar 99,29% (sembilan puluh sembilan koma dua sembilan persen).

4. Pemeliharaan Wifi Ruang Publik dari rencana anggaran sebesar Rp74.349.750,00 (tujuh puluh empat juta tiga ratus empat puluh sembilan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) teralisasi sebesar Rp73.640.000,00 (tujuh puluh tiga juta enam ratus empat puluh ribu rupiah) atau sebesar 99,05% (sembilan puluh sembilan koma nol lima persen);
5. Pemeliharaan Grounding Listrik dan Erester OPD dan Kelurahan dari rencana anggaran sebesar Rp74.425.000,00 (tujuh puluh empat juta empat ratus dua puluh lima ribu rupiah) dan realisasi keuangannya mencapai Rp73.662.000,00 (tujuh puluh tiga juta enam ratus enam puluh dua ribu rupiah) atau sebesar 98,97% (sembilan puluh delapan koma sembilan tujuh persen);
6. Pengembangan dan Pengelolaan *e-Government* dari rencana anggaran sebesar Rp795.250.000,00 (tujuh ratus sembilan puluh lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan realisasi keuangannya mencapai Rp775.790.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh lima juta tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah) atau sebesar 97,55% (sembilan puluh tujuh koma lima lima persen);
7. Pengembangan dan Pengelolaan Website Pemerintah Kota Bogor dari rencana anggaran sebesar Rp48.493.000,00 (empat puluh delapan juta empat ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah) dengan realisasi keuangannya mencapai Rp48.493.000,00 (empat puluh delapan juta empat ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah) atau sebesar 100% (seratus persen);
8. Pengembangan dan Pengelolaan Bogor Green Room dari rencana anggaran sebesar Rp297.144.000,00 (dua ratus sembilan puluh tujuh juta seratus empat puluh empat ribu rupiah) dengan realisasi keuangannya mencapai Rp294.370.000,00 (dua ratus sembilan puluh empat juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah) atau sebesar 99,07 % (sembilan puluh sembilan koma nol tujuh persen);

9. Digitalisasi Profil dari rencana anggaran sebesar Rp29.551.350,00 (dua puluh sembilan juta lima ratus lima puluh satu ribu tiga ratus lima puluh rupiah) dengan realisasi keuangannya mencapai Rp29.030.000,00 (dua puluh sembilan juta tiga puluh ribu rupiah) atau sebesar 98,24% (sembilan puluh delapan koma dua empat persen);
10. Penyelenggaraan Streaming Radio Sipatahunan dari rencana anggaran sebesar Rp95.717.000,00 (sembilan puluh lima juta tujuh ratus tujuh belas ribu rupiah) dengan realisasi keuangannya mencapai Rp95.711.000,00 (sembilan puluh lima juta tujuh ratus sebelas ribu rupiah) atau sebesar 99,99% (sembilan puluh sembilan koma sembilan sembilan persen);
11. Penyelenggaraan siaran Televisi dan Streaming TV Sipatahunan dari rencana anggaran sebesar Rp153.617.000,00 (seratus lima puluh tiga juta enam ratus tujuh belas ribu rupiah) dengan realisasi keuangannya mencapai Rp152.018.000,00 (seratus lima puluh dua jutadelapan belas ribu rupiah) atau sebesar 98,96% (sembilan puluh delapan koma sembilan enam persen);
12. Promosi dan Sosialisasi Layanan Publik berbasis Elektronik dari rencana anggaran sebesar Rp11.660.000,00 (sebelas juta enam ratus enam puluh ribu rupiah) dengan realisasi keuangannya mencapai Rp10.710.000,00 (sepuluh juta tujuh ratus sepuluh ribu rupiah) atau sebesar 91,85% (sembilan puluh satu koma delapan lima persen);
13. Penyelenggaraan Ekosistem TIK dan Kerja Sama Smartcity dari rencana anggaran sebesar Rp38.600.000,00 (tiga puluh delapan juta enam ratus ribu rupiah) dengan realisasi keuangannya mencapai Rp22.350.000,00 (dua puluh dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) atau sebesar 57,9% (lima puluh tujuh koma sembilan persen);

14. Pengadaan Infrastruktur Data Center dari rencana anggaran sebesar Rp295.782.000,00 (dua ratus sembilan puluh lima juta tujuh ratus delapan puluh dua ribu rupiah) dengan realisasi keuangannya mencapai Rp291.270.000,00 (dua ratus sembilan puluh satu juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) atau sebesar 98,47% (sembilan puluh delapan koma empat tujuh persen);
15. Pemeliharaan dan Pengelolaan Infrastruktur Data Center dari rencana anggaran sebesar Rp381.170.450,00 (tiga ratus delapan puluh satu juta seratus tujuh puluh ribu empat ratus lima puluh rupiah) dengan realisasi keuangannya mencapai Rp378.094.000,00 (tiga ratus tujuh puluh delapan juta sembilan puluh empat ribu rupiah) atau sebesar 99,19% (sembilan puluh sembilan koma satu sembilan persen);
16. Pemeliharaan dan Pengembangan Sistem Informasi Kota (SIMATA) dari rencana anggaran sebesar Rp50.540.000,00 (lima puluh juta lima ratus empat puluh ribu rupiah) dengan realisasi keuangannya mencapai Rp50.240.000,00 (lima puluh juta dua ratus empat puluh ribu rupiah) atau sebesar 99,41% (sembilan puluh sembilan koma empat satu persen);
17. Penyediaan Sarana dan Prasarana Teleconference Pemerintah dari rencana anggaran sebesar Rp69.995.000,00 (enam puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) dengan realisasi keuangannya mencapai Rp68.690.000,00 (enam puluh delapan juta enam ratus sembilan puluh ribu rupiah) atau sebesar 98,14% (sembilan puluh delapan koma satu empat persen);
18. Pengelolaan *Contact Centre* Pengaduan Masyarakat dari rencana anggaran sebesar Rp1.322.800.000,00 (satu milyar tiga ratus dua puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah) dengan realisasi keuangannya mencapai Rp1.298.654.982,00 (satu milyar dua ratus sembilan puluh delapan juta enam ratus lima puluh empat ribu sembilan ratus delapan puluh dua rupiah) atau sebesar 98,17% (sembilan puluh delapan koma satu tujuh persen);

19. Pengelolaan dan Pelayanan Komunikasi Publik dari rencana anggaran sebesar Rp47.200.000,00 (empat puluh tujuh juta dua ratus ribu rupiah) dengan realisasi keuangannya mencapai Rp45.550.000,00 (empat puluh lima juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) atau sebesar 96,5% (sembilan puluh enam koma lima persen);
20. Pengembangan Aplikasi Database Komunikasi dari rencana anggaran sebesar Rp35.450.000,00 (tiga puluh lima juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) dengan realisasi keuangannya mencapai Rp34.995.000,00 (tiga puluh empat juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) atau sebesar 98,72% (sembilan puluh delapan koma tujuh dua persen);
21. Pengembangan dan Pengelolaan Keamanan Informasi dan Persandian dari rencana anggaran sebesar Rp136.608.000,00 (seratus tiga puluh enam juta enam ratus delapan ribu rupiah) dengan realisasi keuangannya mencapai Rp134.538.000,00 (seratus tiga puluh empat juta lima ratus tiga puluh delapan ribu rupiah) atau sebesar 98,48% (sembilan puluh delapan koma empat delapan persen);
22. Penyusunan Regulasi TIK (Perwali dan SOP) dari rencana anggaran sebesar Rp1.429.550,00 (satu juta empat ratus dua puluh sembilan ribu lima ratus lima puluh rupiah) terealisasi Rp0,00 (nol rupiah) atau sebesar 0% (nol persen) karena kegiatan ini hanya honor pelaksanaan kegiatan dan penggandaan dan sudah diserap pada kegiatan lain namun secara output telah disusun 2 (dua) buah Peraturan Wali Kota;
23. Pemeliharaan dan Pengembangan CCTV dan Multimedia Kota Bogor dari rencana anggaran sebesar Rp353.273.510,00 (tiga ratus lima puluh tiga juta dua ratus tujuh puluh tiga ribu lima ratus sepuluh rupiah) terealisasi Rp347.275.000,00 (tiga ratus empat puluh tujuh juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) atau sebesar 98,3% (sembilan puluh delapan koma tiga persen);

24. Penyelenggaraan Diseminasi Dan Kemitraan Media Publik dari rencana anggaran sebesar Rp63.417.000,00 (enam puluh tiga juta empat ratus tujuh belas ribu rupiah) terealisasi Rp63.062.600,00 (enam puluh tiga juta enam puluh dua ribu enam ratus rupiah) atau sebesar 99,44% (Sembilan puluh sembilan koma empat empat persen);
25. Pembangunan Wifi Ruang Publik dari rencana anggaran sebesar Rp59.262.000,00 (lima puluh sembilan juta dua ratus enam puluh dua ribu rupiah) terealisasi Rp58.900.000,00 (lima puluh delapan juta sembilan ratus ribu rupiah) atau sebesar 99,39% (sembilan puluh sembilan koma tiga sembilan persen);
26. Pengadaan Modul Aplikasi Pengaduan Masyarakat dari rencana anggaran sebesar Rp88.200.000,00 (delapan puluh delapan juta dua ratus ribu rupiah) terealisasi Rp85.527.500,00 (delapan puluh lima juta lima ratus dua puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) atau sebesar 96,97% (sembilan puluh enam koma sembilan tujuh persen);
27. Penilaian Index e-Government Indonesia dari rencana anggaran sebesar Rp33.588.200,00 (tiga puluh tiga juta lima ratus delapan puluh delapan ribu dua ratus rupiah) terealisasi Rp29.838.200,00 (dua puluh sembilan juta delapan ratus tiga puluh delapan ribu dua ratus rupiah) atau sebesar 88,84% (delapan puluh delapan koma delapan empat persen);
28. Pengembangan dan Pembuatan Datawarehouse dari rencana anggaran sebesar Rp36.040.000,00 (tiga puluh enam juta empat puluh ribu rupiah) terealisasi Rp35.790.000,00 (tiga puluh lima juta tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah) atau sebesar 99,31% (sembilan puluh sembilan koma tiga satu persen);

29. Penyelenggaraan Statistik Sektoral dari rencana anggaran sebesar Rp4.378.000,00 (empat juta tiga ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah) terealisasi Rp4.378.000,00 (empat juta tiga ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah) atau sebesar 100% (seratus persen);

e) Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi

terdiri dari 2 (dua) kegiatan dengan rincian sebagai berikut:

1. Penyelenggaraan Pelatihan bagi SDM TIK seluruh OPD dari rencana anggaran sebesar Rp8.829.000,00 (delapan juta delapan ratus dua puluh sembilan ribu rupiah) dengan realisasi keuangannya mencapai Rp8.829.000,00 (delapan juta delapan ratus dua puluh sembilan ribu rupiah) atau sebesar 100% (seratus persen);
2. Pelatihan Aplikasi Pengaduan Masyarakat dari rencana anggaran sebesar Rp12.400.000,00 (dua belas juta empat ratus ribu rupiah) dengan realisasi keuangannya mencapai Rp12.400.000,00 (dua belas juta empat ratus ribu rupiah) atau sebesar 100% (seratus persen).

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bogor dan Pencapaian Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bogor s/d Tahun 2019

Nama Perangkat Daerah: Dinas Komunikasi Dan Informatika Kota Bogor

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2019	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2018 (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2019 (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2019	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2018 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2018 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2019 (n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	URUSAN WAJIB									
	URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR									
	BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA									
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Prosentase pemenuhan kebutuhan operasional Perangkat Daerah	90%	90%			100%			100%
	Pengelolaan Rumah Tangga PD									
		Honorarium Non PNS			Honorarium Non PNS : 12 bulan	Honorarium Non PNS : 12 bulan		Honorarium Non PNS : 12 bulan	Honorarium Non PNS : 12 bulan	

1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
		Belanja Barang Pakai Habis (ATK, Alat Listrik, Perangko/ Benda Pos Lainnya, Peralatan			Belanja Barang Pakai Habis (ATK, Alat Listrik, Perangko/ Benda Pos Lainnya, Peralatan : 12 bulan	Belanja Barang Pakai Habis (ATK, Alat Listrik, Perangko/ Benda Pos Lainnya, Peralatan : 12 bulan		Belanja Barang Pakai Habis (ATK, Alat Listrik, Materai, Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih dan Bahan Pakai Habis Rumah Tangga) : 12 bulan	Belanja Barang Pakai Habis (ATK, Alat Listrik, Materai, Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih dan Bahan Pakai Habis Rumah Tangga) : 12 bulan	
		Kebersihan dan Bahan Pembersih, Bahan Dekorasi dan Desain Interior/ Eksterior dan Peralatan dan Bahan Pakai Habis Rumah Tangga			Kebersihan dan Bahan Pembersih, Bahan Dekorasi dan Desain Interior/ Eksterior dan Peralatan dan Bahan Pakai Habis Rumah Tangga : 12 bulan	Kebersihan dan Bahan Pembersih, Bahan Dekorasi dan Desain Interior/ Eksterior dan Peralatan dan Bahan Pakai Habis Rumah Tangga : 12 bulan		Belanja Cetak dan Penggandaan : 12 bulan	Belanja Cetak dan Penggandaan : 12 bulan	

1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
		Belanja Jasa Kantor (Belanja jasa telepon, Bel. Surat Kabar dan Majalah)			Belanja Jasa Kantor (Belanja jasa telepon, Bel. Surat Kabar dan Majalah) : 12 bulan	Belanja Jasa Kantor (Belanja jasa telepon, Bel. Surat Kabar dan Majalah) : 12 bulan		Belanja Jasa Kantor (Belanja Jasa Telepon, Belanja Surat Kabar dan Majalah) : 12 bulan	Belanja Jasa Kantor (Belanja Jasa Telepon, Belanja Surat Kabar dan Majalah) : 12 bulan	
		Belanja Cetak dan Penggandaan			Belanja Cetak dan Penggandaan : 12 bulan	Belanja Cetak dan Penggandaan : 12 bulan		Belanja Makanan dan Minuman (Bel.Mamin Harian Pegawai, Mamin Tamu dan Mamin Pelatihan) : 12 bulan	Belanja Makanan dan Minuman (Bel.Mamin Harian Pegawai, Mamin Tamu dan Mamin Pelatihan) : 12 bulan	
		Belanja Makanan dan Minuman (Bel. Mamin Harian Pegawai, Mamin Rapat dan Mamin Tamu)			Belanja Makanan dan Minuman (Bel. Mamin Harian Pegawai, Mamin Rapat dan Mamin Tamu) : 12 bulan	Belanja Makanan dan Minuman (Bel. Mamin Harian Pegawai, Mamin Rapat dan Mamin Tamu) : 12 bulan		Belanja Pakaian Dinas dan Atribut : 50 stel		

1				2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
											Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah : 12 bulan		
											Honorarium PNS (Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan, Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa) : 12 bulan	Honorarium PNS (Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan, Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa) : 12 bulan	
											Belanja Jasa Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur/Pengajar-Non PNS (Staf Ahli Bidang Komunikasi) : 12 bulan	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur/Pengajar-Non PNS (Staf Ahli Bidang Komunikasi) : 5 bulan	

1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
								Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah : 12 bulan	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah : 12 bulan	
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Prosentase pemenuhan sarana prasarana aparatur	90%	90%			100%			100%
	Pengadaan Inventaris Kantor									
		Mobil 2400cc			Tersedianya Mobil 2400cc : 1 unit	Tersedianya Mobil 2400cc : 1 unit		Tersedianya Mobil 1500 cc : 1 unit		
		Motor 125cc			Tersedianya Motor 125 cc : 2 unit	Tersedianya Motor 125 cc : 2 unit		Tersedianya Motor 125 cc : 3 unit		
		Mesin Tik Elektrik			Tersedianya Mesin Tik Elektrik : 1 unit	Tersedianya Mesin Tik Elektrik : 1 unit		Tersedianya Kursi Kerja Sandaran Sedang : 20 unit	Tersedianya Kursi Kerja Sandaran Sedang : 24 unit	
		Alat Penghancur Kertas			Tersedianya Alat Penghancur Kertas : 1 unit	Tersedianya Alat Penghancur Kertas : 1 unit		Tersedianya AC 2 PK : 5 unit	Tersedianya AC 2 PK : 8 unit	

1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
		Kursi Kerja Sandaran Sedang			Tersedianya Kursi Kerja Sandaran Sedang : 4 unit	Tersedianya Kursi Kerja Sandaran Sedang : 4 unit		Tersedianya PC Core i5 : 12 unit	Tersedianya PC Core i5 : 6 unit	
		Meja Kerja			Tersedianya Meja Kerja : 1 unit	Tersedianya Meja Kerja : 1 unit		Tersedianya Printer : 10 unit	Tersedianya Printer : 10 unit	
		Sofa			Tersedianya Sofa : 1 unit	Tersedianya Sofa : 1 unit		Tersedianya Harddisk Eksternal : 3 unit	Tersedianya Harddisk Eksternal : 3 unit	
		AC			Tersedianya AC : 1 unit	Tersedianya AC : 1 unit		Tersedianya Monitor 21.5" : 1 unit	Tersedianya Monitor 21.5" : 1 unit	
		Dispenser			Tersedianya Dispenser : 2 unit	Tersedianya Dispenser : 2 unit		Tersedianya Proyektor : 1 unit	Tersedianya Proyektor : 1 unit	
		PC Core i7			Tersedianya PC Core i7 : 1 unit	Tersedianya PC Core i7 : 1 unit		Tersedianya Layar Proyektor : 1 unit	Tersedianya Layar Proyektor : 1 unit	
		Laptop Core i7			Tersedianya Laptop Core i7 : 1 unit	Tersedianya Laptop Core i7 : 1 unit		Tersedianya Audio Mixer : 1 unit	Tersedianya Audio Mixer : 1 unit	
		PC Core i3			Tersedianya PC Core i3 : 2 unit	Tersedianya PC Core i3 : 2 unit		Tersedianya Laptop Core i7 : 1 unit	Tersedianya Laptop Core i7 : 1 unit	

1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
		Printer			Tersedianya Printer : 3 unit	Tersedianya Printer : 3 unit		Tersedianya Laptop Core i5 : 1 unit	Tersedianya Laptop Core i5 : 1 unit	
		Camera			Tersedianya Camera : 1 unit	Tersedianya Camera : 1 unit				
		Mesin Absen			Tersedianya Mesin Absen : 2 unit	Tersedianya Mesin Absen : 2 unit				
		Tripod			Tersedianya Tripod : 1 unit	Tersedianya Tripod : 1 unit				
		Facsimile			Tersedianya Facsimile : 1 unit	Tersedianya Facsimile : 1 unit				
		Pemeliharaan Rutin Berkala Inventaris Kantor								
		Terpeliharanya Inventaris Kantor			Terpeliharanya Inventaris Kantor : 100%	Terpeliharanya Inventaris Kantor : 100%		Terpeliharanya Inventaris Kantor : 100%	Terpeliharanya Inventaris Kantor : 100%	
		Terpeliharanya Kendaraan Dinas Operasional dan Penggantian Suku Cadang			Terpeliharanya Kendaraan Dinas Operasional dan Penggantian Suku Cadang : 100%	Terpeliharanya Kendaraan Dinas Operasional dan Penggantian Suku Cadang : 100%		Terpeliharanya kendaraan dinas operasional, dan penggantian suku cadang : 1 paket	Terpeliharanya kendaraan dinas operasional, dan penggantian suku cadang : 1 paket	

1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
		Terpeliharanya Peralatan Kantor			Terpeliharanya Peralatan Kantor : 12 bulan	Terpeliharanya Peralatan Kantor : 12 bulan		Terpeliharanya Peralatan kantor : 12 bulan	Terpeliharanya Peralatan kantor : 12 bulan	
		Terpeliharanya Bangunan			Terpeliharanya Bangunan : 12 bulan	Terpeliharanya Bangunan : 12 bulan		Terpeliharanya Bangunan : 12 bulan		
								Terpeliharanya Pintu Gedung dan Bangunan : 12 bulan	Terpeliharanya Pintu Gedung dan Bangunan : 12 bulan	
		Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Nilai LAKIP Perangkat Daerah	70	75,10			100%		100%
		Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan PD								
		Tersedianya Dokumen Rencana kerja Perangkat Daerah Tahun 2019			Tersedianya Dokumen Rencana kerja Perangkat Daerah Tahun 2019 : 1 dokumen	Tersedianya Dokumen Rencana kerja Perangkat Daerah Tahun 2019 : 1 dokumen		Tersedianya Dokumen Rencana kerja Perangkat Daerah : 1 dokumen	Tersedianya Dokumen Rencana kerja Perangkat Daerah : 1 dokumen	

1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
		Tersedianya Dokumen LAKIP Perangkat Daerah Tahun 2018			Tersedianya Dokumen LAKIP Perangkat Daerah Tahun 2018 : 1 dokumen	Tersedianya Dokumen LAKIP Perangkat Daerah Tahun 2018 : 1 dokumen		Tersedianya Dokumen LKPJ Perangkat Daerah : 1 dokumen	Tersedianya Dokumen LKPJ Perangkat Daerah : 1 dokumen	
		Tersedianya Dokumen LKPJ Perangkat Daerah Tahun 2018			Tersedianya Dokumen LKPJ Perangkat Daerah Tahun 2018 : 1 dokumen	Tersedianya Dokumen LKPJ Perangkat Daerah Tahun 2018 : 1 dokumen		Tersedianya Dokumen LPPD Perangkat Daerah : 1 dokumen	Tersedianya Dokumen LPPD Perangkat Daerah : 1 dokumen	
		Tersedianya Dokumen LPPD Perangkat Daerah Tahun 2018			Tersedianya Dokumen LPPD Perangkat Daerah Tahun 2018 : 1 dokumen	Tersedianya Dokumen LPPD Perangkat Daerah Tahun 2018 : 1 dokumen		Tersedianya Dokumen LAKIP Perangkat Daerah : 1 dokumen	Tersedianya Dokumen LAKIP Perangkat Daerah : 1 dokumen	
		Tersedianya Dokumen Rencana Strategis Perangkat Daerah			Tersedianya Dokumen Rencana Strategis Perangkat Daerah : 1 dokumen	Tersedianya Dokumen Rencana Strategis Perangkat Daerah : 1 dokumen				

1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	Jumlah ruang publik yang di sediakan infrastruktur jaringan informasi dan komunikasi	40 Lokasi	50 Lokasi			100%			100%
		Prosentase SIM yang telah Terintegrasi lintas PD	20,39%	20,59%			100%			100%
		Prosentase PD yang menyediakan data dan informasi melalui media elektronik	100%	100%			100%			100%
		Prosentase Penyebarluasan informasi pemerintah daerah kepada masyarakat					100%			
	Pengadaan BANDWIDTH	Tersedianya bandwidth internet untuk OPD se-Kota Bogor			Tersedianya bandwidth internet untuk OPD se-Kota Bogor : 400 Mbps	Tersedianya bandwidth internet untuk OPD se-Kota Bogor : 900 Mbps (APBD dan APBDP)		Tersedianya Bandwidth internet OPD Se-Kota Bogor : 500 Mbps	Tersedianya Bandwidth internet OPD Se-Kota Bogor : 400 Mbps	

1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	Pemeliharaan jaringan intranet dan internet (BACKBONE) Kota Bogor	Terpeliharanya jaringan intranet dan internet (backbone) dan tertatanya jaringan intranet LAN pada SKPD se - Kota Bogor			Terpeliharanya jaringan intranet dan internet (backbone) dan tertatanya jaringan intranet LAN pada SKPD se - Kota Bogor : 145 titik	Terpeliharanya jaringan intranet dan internet (backbone) dan tertatanya jaringan intranet LAN pada SKPD se - Kota Bogor : 145 titik		Terpeliharanya jaringan intranet dan internet (backbone) : 145 titik	Terpeliharanya jaringan intranet dan internet (backbone) : 145 titik	
								Tertatanya jaringan intranet LAN pada SKPD se-Kota Bogor : 145 titik	Tertatanya jaringan intranet LAN pada SKPD se-Kota Bogor : 145 titik	
	Pengembangan Infrastruktur Jaringan Kota	Tersedianya jaringan Fiber Optik di OPD			Tersedianya jaringan Fiber Optik di OPD : 6 titik	Tersedianya jaringan Fiber Optik di OPD : 6 titik		Tersedianya jaringan Fiber Optik di OPD : 6 titik	Tersedianya jaringan Fiber Optik di OPD : 5 titik	
	Pemeliharaan Wifi Ruang Publik	Tersedianya Ruang Publik yang memiliki Wifi			Tersedianya Ruang Publik yang memiliki Wifi : 30 titik	Tersedianya Ruang Publik yang memiliki Wifi : 30 titik		Tersedianya ruang publik yang memiliki wifi : 30 titik		
								Stabilnya koneksi wifi di ruang publik : 45 titik	Stabilnya koneksi wifi di ruang publik : 45 titik	

1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	Pemeliharaan Grounding Listrik dan Erester OPD dan Kelurahan	Terpeliharanya Grounding Listrik dan erester OPD dan Kelurahan			Terpeliharanya Grounding Listrik dan erester OPD dan Kelurahan : 4 titik lokasi	Terpeliharanya Grounding Listrik dan erester OPD dan Kelurahan : 4 titik lokasi		Terpeliharanya grounding listrik dan erester OPD dan kelurahan : 4 titik	Terpeliharanya grounding listrik dan erester OPD dan kelurahan : 4 titik	
	Pengembangan dan Pengelolaan e-Government									
		Aplikasi Smart Posyandu			Aplikasi Smart Posyandu : 1 aplikasi	Aplikasi Smart Posyandu : 1 aplikasi		Aplikasi Smart Posyandu : 1 aplikasi		
		Pengembangan dan Pendampingan SIMRAL			Pengembangan dan Pendampingan SIMRAL : 1 aplikasi	Pengembangan dan Pendampingan SIMRAL : 1 aplikasi		Pengembangan dan Pendampingan SIMRAL : 1 aplikasi	Pengembangan dan Pendampingan SIMRAL : 1 aplikasi	
		Aplikasi Manajemen Server			Aplikasi Manajemen Server : 1 aplikasi	Aplikasi Manajemen Server : 1 aplikasi		Aplikasi Manajemen Server Cpanel : 1 aplikasi	Aplikasi Manajemen Server Cpanel : 1 aplikasi	
		Tersedianya Tenaga Outsourcing Programmer			Tersedianya Tenaga Outsourcing Programmer : 3 orang	Tersedianya Tenaga Outsourcing Programmer : 3 orang		Tersedianya Tenaga Outsourcing Programmer : 3 orang	Tersedianya Tenaga Outsourcing Programmer : 3 orang	

1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
		Tersedianya Tenaga Outsourcing Surveyor			Tersedianya Tenaga Outsourcing Surveyor : 3 orang	Tersedianya Tenaga Outsourcing Surveyor : 3 orang		Tersedianya Tenaga Outsourcing Surveyor : 3 orang	Tersedianya Tenaga Outsourcing Surveyor : 3 orang	
		Tersedianya Tenaga Outsourcing Designer			Tersedianya Tenaga Outsourcing Designer : 3 orang	Tersedianya Tenaga Outsourcing Designer : 3 orang		Tersedianya Tenaga Outsourcing Designer grafis : 3 orang	Tersedianya Tenaga Outsourcing Designer grafis : 3 orang	
		tersedianya webmail Kota Bogor			tersedianya webmail Kota Bogor : 1 aplikasi	tersedianya webmail Kota Bogor : 1 aplikasi		Tersedianya webmail Kota Bogor : 1 aplikasi	Tersedianya webmail Kota Bogor : 1 aplikasi	
		Outsouching Khusus Simral			Outsouching Khusus Simral : 2 orang	Outsouching Khusus Simral : 2 orang		Tersedianya Colocation Cloud : 1 paket	Tersedianya Colocation Cloud : 1 paket	
		Layanan Co-Locationt Untuk 2 (dua) Server Rack 2U			Layanan Co-Locationt Untuk 2 (dua) Server Rack 2U : 1 aplikasi	Layanan Co-Location Untuk 2 (dua) Server Rack 2U : 1 aplikasi				
		Biaya Instalasi			Biaya Instalasi : 1 aplikasi	Biaya Instalasi : 1 aplikasi				
		Belanja Pembangunan Aplikasi Manajemen Perkara			Terbangunan Aplikasi Manajemen Perkara : 1 aplikasi	Terbangunan Aplikasi Manajemen Perkara : 1 aplikasi				

1				2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
					Belanja Pembangunan Aplikasi Intel dan pembinaan			Terbangunan Aplikasi Aplikasi Intel dan pembinaan : 1 aplikasi	Terbangunan Aplikasi Aplikasi Intel dan pembinaan : 1 aplikasi				
					Belanja Pembangunan Aplikasi Sistem Pengawasan dan Informasi Publik			Terbangunnya Aplikasi Sistem Pengawasan dan Informasi Publik : 1 aplikasi	Terbangunnya Aplikasi Sistem Pengawasan dan Informasi Publik : 1 aplikasi				
					Belanja Pembangunan Aplikasi e-kinerja			Terbangunnya Aplikasi e-kinerja : 1 aplikasi	Terbangunnya Aplikasi e-kinerja : 1 aplikasi				
					Belanja Pembangunan Aplikasi mobile Kinerja			Terbangunnya Aplikasi mobile Kinerja : 1 aplikasi	Terbangunnya Aplikasi mobile Kinerja : 1 aplikasi				
					Belanja Pembangunan Aplikasi Protokol API-Kinerja			Terbangunnya Aplikasi Protokol API-Kinerja : 1 aplikasi	Terbangunnya Aplikasi Protokol API-Kinerja : 1 aplikasi				

1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	Pengembangan dan Pengelolaan Website Pemerintah Kota Bogor									
		Terlaksananya Pengelolaan website Pemkot Bogor			Terlaksananya Pengelolaan website Pemkot Bogor : 2,500,000 kunjungan	Terlaksananya Pengelolaan website Pemkot Bogor : 7,782,818 kunjungan		Terlaksananya Pengelolaan website Pemkot Bogor : 2,500,000 kunjungan	Terlaksananya Pengelolaan website Pemkot Bogor : 5,322,488 kunjungan	
		Tersedianya Keberlangsungan website dan Kota Bogor			Tersedianya Keberlangsungan website dan Kota Bogor : 1 aplikasi	Tersedianya Keberlangsungan website dan Kota Bogor : 1 aplikasi		Tersedianya Keberlangsungan website dan Kota Bogor : 1 aplikasi	Tersedianya Keberlangsungan website dan Kota Bogor : 1 aplikasi	
	Pengembangan dan pembuatan repository / data Warehouse	Terintegrasinya Data Kependudukan, SIMRAL, SMART Perijinan, SIM DISPENDA, SIM PATEN, dan Dashboard Pemerintah			Terintegrasinya Data Kependudukan, SIMRAL, SMART Perijinan, SIM DISPENDA, SIM PATEN, dan Dashboard Pemerintah : 40%	Terintegrasinya Data Kependudukan, SIMRAL, SMART Perijinan, SIM DISPENDA, SIM PATEN, dan Dashboard Pemerintah : 97.17%		Terintegrasinya Data Kependudukan, SIMRAL, SMART Perijinan, SIM DISPENDA, SIM PATEN, dan Dashboard Pemerintah : 40%		

1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
								Tersedianya Pemeliharaan dan Pengembangan Aplikasi Datawarehouse : 1 paket	Tersedianya Pemeliharaan dan Pengembangan Aplikasi Datawarehouse : 1 paket	
	Pengembangan dan Pengelolaan Bogor Green Room									
		Pemeliharaan Video Wall Bogor Green Room			Terpeliharanya Video Wall Bogor Green Room : 1 paket	Terpeliharanya Video Wall Bogor Green Room : 1 paket		Tersedianya Outsourcing Operator Bogor Green Room : 4 orang	Tersedianya Outsourcing Operator Bogor Green Room : 4 orang	
		Pemeliharaan TV Wall Bogor Green Room			Terpeliharanya TV Wall Bogor Green Room : 1 paket	Terpeliharanya TV Wall Bogor Green Room : 1 paket		Terpeliharanya Video Wall Bogor Green Room : 1 paket		
		Tersedianya Outsourcing Operator Bogor Green Room			Tersedianya Outsourcing Operator Bogor Green Room : 4 orang	Tersedianya Outsourcing Operator Bogor Green Room : 4 orang		Terpeliharanya TV Wall Bogor Green Room : 1 paket		
		Terencananya pengelolaan dan pengembangan Bogor Green Room			Terencananya pengelolaan dan pengembangan Bogor Green Room : 80%	Terencananya pengelolaan dan pengembangan Bogor Green Room : 80%		Terpeliharanya Perangkat Multimedia Bogor Green Room : 1 paket	Terpeliharanya Perangkat Multimedia Bogor Green Room : 1 paket	

1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	Digitalisasi Profil Kota Bogor	Tersedianya Pengembangan Aplikasi Mesin Anjungan			Tersedianya Pengembangan Aplikasi Mesin Anjungan : 1 paket	Tersedianya Pengembangan Aplikasi Mesin Anjungan : 1 paket		Tersedianya Pengembangan Aplikasi Mesin Anjungan : 1 paket	Tersedianya Pengembangan Aplikasi Mesin Anjungan : 1 paket	
								Terpeliharanya Mesin Anjungan Informasi dan TV Streaming Kelurahan : 1 paket		
								Terpeliharanya Mesin Anjungan Informasi : 1 paket	Terpeliharanya Mesin Anjungan Informasi : 1 paket	
	Penyelenggaraan Streaming Radio Sipatahunan									
		Terselenggaranya Siaran Radio dan Streaming Radio Sipatahunan			Terselenggaranya Siaran Radio dan Streaming Radio Sipatahunan : 5760 jam siaran	Terselenggaranya Siaran Radio dan Streaming Radio Sipatahunan : 5760 jam siaran		Terselenggaranya Streaming Radio Sipatahunan : 5,760 jam	Terselenggaranya Streaming Radio Sipatahunan : 5,760 jam	
		Operasional Siaran Radio dan Streaming Radio Sipatahunan			Operasional Siaran Radio dan Streaming Radio Sipatahunan : 100%	Operasional Siaran Radio dan Streaming Radio Sipatahunan : 70.98%		Operasional Streaming Radio Sipatahunan : 12 bulan	Operasional Streaming Radio Sipatahunan : 12 bulan	

1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
		Peliputan/Penyiaran/Operator Siaran Radio dan Streaming Radio Sipatahunan			Peliputan/Penyiaran/Operator Siaran Radio dan Streaming Radio Sipatahunan : 80 kali	Peliputan/Penyiaran/Operator Siaran Radio dan Streaming Radio Sipatahunan : 191 kali		Peliputan/Penyiaran/Operatoring Siaran Radio dan Streaming Radio Sipatahunan : 80 kali		
		Tersedianya dan Terpeliharanya Alat-Alat Radio			Tersedianya dan Terpeliharanya Alat-Alat Radio : 1 paket	Tersedianya dan Terpeliharanya Alat-Alat Radio : 1 paket		Tersedianya dan Terpeliharanya Alat-Alat Studio Radio Sipatahunan : 1 paket	Tersedianya dan Terpeliharanya Alat-Alat Studio Radio Sipatahunan : 1 paket	
								Peliputan/Penyiaran dan Operatoring Radio Sipatahunan : 80 kali	Peliputan/Penyiaran dan Operatoring Radio Sipatahunan : 80 kali	
		Penyelenggaraan siaran Televisi dan Streaming TV Sipatahunan								
		Terselenggaranya Siaran TV dan Streaming TV Sipatahunan			Terselenggaranya Siaran TV dan Streaming TV Sipatahunan : 5760 jam siaran	Terselenggaranya Siaran TV dan Streaming TV Sipatahunan : 5760 jam siaran		Terselenggaranya Streaming Televisi Sipatahunan : 5,760 jam	Terselenggaranya Streaming Televisi Sipatahunan : 5,760 jam	

1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
		Operasional Siaran TV dan Streaming TV Sipatahunan			Operasional Siaran TV dan Streaming TV Sipatahunan : 100%	Operasional Siaran TV dan Streaming TV Sipatahunan : 94,23%		Operasional Streaming Televisi Sipatahunan : 12 bulan	Operasional Streaming Televisi Sipatahunan : 12 bulan	
		Peliputan/Penyiaran/Operator Siaran TV dan Streaming TV Sipatahunan			Peliputan/Penyiaran/Operator Siaran TV dan Streaming TV Sipatahunan : 80 kali	Peliputan/Penyiaran/Operator Siaran TV dan Streaming TV Sipatahunan : 191 kali		Peliputan/Penyiaran/Operatoring/Editing Siaran TV dan Streaming TV Sipatahunan : 80 kali	Peliputan/Penyiaran/Operatoring/Editing Siaran TV dan Streaming TV Sipatahunan : 80 kali	
		Tersedianya dan Terpeliharanya Alat-Alat Studio			Tersedianya dan Terpeliharanya Alat-Alat Studio : 1 paket	Tersedianya dan Terpeliharanya Alat-Alat Studio : 1 paket		Tersedianya dan Terpeliharanya Alat-Alat Studio Televisi Sipatahunan : 1 paket	Tersedianya dan Terpeliharanya Alat-Alat Studio Televisi Sipatahunan : 2 paket	
								Pembuatan Konten : 1 paket	Pembuatan Konten : 1 paket	
								Peliputan/Kameramen/Editing : 365 kali	Peliputan/Kameramen/Editing : 360 kali	
	Pengadaan Infrastruktur Data Center	Tersedianya Perangkat data center			Tersedianya Perangkat data center : 2 paket	Tersedianya Perangkat data center : 2 paket		Tersedianya perangkat Pusat Data : 2 paket	Tersedianya perangkat Pusat Data : 2 paket	

1				2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
				Pemeliharaan dan pengelolaan Infrastruktur Data Center									
					Tersedianya outsourcing Data Center			Tersedianya outsourcing Data Center : 1 paket	Tersedianya outsourcing Data Center : 1 paket		Tersedianya outsourcing Pusat Data : 1 paket	Tersedianya outsourcing Pusat Data : 1 paket	
					Terlaksananya pembayaran perangkat lunak data center			Terlaksananya pembayaran perangkat lunak data center : 1 paket	Terlaksananya pembayaran perangkat lunak data center : 1 paket		Terlaksananya pembayaran perangkat lunak data center : 1 paket		
					Tertatanya perangkat data center			Tertatanya perangkat data center : 1 paket	Tertatanya perangkat data center : 1 paket		Tertatanya perangkat Pusat Data : 1 paket	Tertatanya perangkat Pusat Data : 1 paket	
											Terlaksananya pencadangan dan dukungan Pusat Data : 1 paket	Terlaksananya pencadangan dan dukungan Pusat Data : 1 paket	
				Pemeliharaan dan Pengembangan Sistem Informasi Kota (SIMATA)	Tersedianya Pengembangan Aplikasi SIMATA			Tersedianya Pengembangan Aplikasi SIMATA : 1 paket	Tersedianya Pengembangan Aplikasi SIMATA : 1 paket		Tersedianya Pengembangan Aplikasi SIMATA : 1 paket	Tersedianya Pengembangan Aplikasi SIMATA : 1 paket	

1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	Workshop penyusunan Indikator Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Tersedianya data IPM mulai dari tingkat kelurahan sampai kota untuk kepentingan perencanaan pembangunan			Tersedianya data IPM mulai dari tingkat kelurahan sampai kota untuk kepentingan perencanaan pembangunan : 1 kegiatan	Tersedianya data IPM mulai dari tingkat kelurahan sampai kota untuk kepentingan perencanaan pembangunan : 1 kegiatan				
	Pengelolaan Layanan Nomor Tunggal Panggilan Darurat 112	Terselenggaranya Layanan Kedaruratan di Kota Bogor			Terselenggaranya Layanan Kedaruratan di Kota Bogor : 80%	Terselenggaranya Layanan Kedaruratan di Kota Bogor : 69,50%		Tersedianya pelayanan pengaduan 112 : 12 bulan		
								Tersedianya Jasa Layanan Telepon PSTN 112 : 1 paket		
								Tersedianya Tenaga outsourcing Petugas NTPD 112 : 1 paket		
								Tersedianya Meja Workstation Supervisor : 3 unit		
								Tersedianya Meja Workstation Kubikel Call Taker : 1 set		

1				2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
											Tersedianya Kursi Petugas NTPD 112 : 15 unit		
											Tersedianya Seragam Pengaduan Call Center 112 : 1 paket		
											Tersedianya Komputer Operator NTPD 112 : 5 unit		
											Tersedianya Lemari Locker NTPD 112 : 3 set		
											Tersedianya Server NTPD 112 : 1 unit		
											Tersedianya Headset Petugas NTPD 112 : 4 unit		
				Penyediaan Sarana dan Prasarana Teleconference Pemerintah									
					Tersedianya Perangkat Teleconference			Tersedianya Perangkat Teleconference : 1 paket	Tersedianya Perangkat Teleconference : 1 paket			Terpeliharanya Perangkat Teleconference : 1 paket	

1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
		Tersedianya Server Teleconference			Tersedianya Server Teleconference : 1 paket	Tersedianya Server Teleconference : 1 paket		Terpeliharanya Perangkat Sound System Wireless : 1 paket	Terpeliharanya Perangkat Sound System Wireless : 1 paket	
		Tersedianya Perangkat Sound Sistem Wireless			Tersedianya Perangkat Sound Sistem Wireless : 1 paket	Tersedianya Perangkat Sound Sistem Wireless : 1 paket		Tersedianya Server Teleconference : 1 paket	Tersedianya Server Teleconference : 1 paket	
		Pengelolaan Contact Center Pengaduan Masyarakat								
		Tersedianya Layanan Contact Center (sewa perangkat dan Sewa Layanan)			Tersedianya Layanan Contact Center (sewa perangkat dan Sewa Layanan) : 1 paket	Tersedianya Layanan Contact Center (sewa perangkat dan Sewa Layanan) : 1 paket		Tersedianya Layanan Contact Center dan Pengaduan (Sewa Perangkat dan Sewa Layanan) : 1 paket	Tersedianya Layanan Contact Center dan Pengaduan (Sewa Perangkat dan Sewa Layanan) : 1 paket	
		Tersedianya Operator Call Center			Tersedianya Operator Call Center : 2 orang	Tersedianya Operator Call Center : 2 orang		Tersedianya Aplikasi BISA yang Update dan Optimal : 1 aplikasi		
								Tersedianya Personal Komputer : 7 unit	Tersedianya Personal Komputer : 7 unit	
								Tersedianya Printer : 2 unit	Tersedianya Printer : 2 unit	

1				2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
											Tersedianya Meja dan Kursi Petugas operator : 7 unit	Tersedianya Meja dan Kursi Petugas operator : 7 unit	
											Tersedianya Lemari Locker : 1 unit	Tersedianya Lemari Locker : 1 unit	
											Tersedianya Mickropon headset : 10 unit	Tersedianya Mickropon headset : 10 unit	
				Pelayanan dan Pengelolaan Informasi Publik									
					Pembuatan Buku profil			Pembuatan Buku profil : 100 buku	Pembuatan Buku profil : 100 buku			Survey Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan NTPD 112 dan Contact Center : 1 paket	
					Fasilitasi dan konsultasi bagi pengelola informasi publik (SPPD)			Fasilitasi dan konsultasi bagi pengelola informasi publik (SPPD) : 1 paket	Fasilitasi dan konsultasi bagi pengelola informasi publik (SPPD) : 1 paket				
				Pengelolaan dan Pelayanan Komunikasi Publik									
					Pembuatan Booklet			Pembuatan Booklet : 1 paket	Pembuatan Booklet : 1 paket			Pembuatan Booklet : 1 paket	Pembuatan Booklet : 1 paket

1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
		Fasilitasi dan konsultasi bagi pengelolaan informasi publik			Fasilitasi dan konsultasi bagi pengelolaan informasi publik : 1 paket	Fasilitasi dan konsultasi bagi pengelolaan informasi publik : 1 paket				
	Pengembangan Aplikasi Data Base Komunikasi	Tersedianya Aplikasi Database Komunikasi yang Update dan Optimal			Tersedianya Aplikasi Database Komunikasi yang Update dan Optimal : 1 aplikasi	Tersedianya Aplikasi Database Komunikasi yang Update dan Optimal : 1 aplikasi		Tersedianya Aplikasi Database Komunikasi yang Update dan Optimal : 1 aplikasi	Tersedianya Aplikasi Database Komunikasi yang Update dan Optimal : 1 aplikasi	
	Pengembangan dan Pengelolaan Keamanan Informasi dan Persandian									
		Terkelolanya Komunikasi Persandian			Terkelolanya Komunikasi Persandian : 100%	Terkelolanya Komunikasi Persandian : 100%		Terpeliharanya sistem informasi : 30%	Terpeliharanya sistem informasi : 30%	
		Tersedianya Alat Komunikasi HT			Tersedianya Alat Komunikasi HT : 5 unit	Tersedianya Alat Komunikasi HT : 5 unit		Terkelolanya komunikasi persandian : 100%	Terkelolanya komunikasi persandian : 100%	
		Terselenggaranya Sosialisasi Standar Sistem Manajemen Keamanan Informasi			Terselenggaranya Sosialisasi Standar Sistem Manajemen Keamanan Informasi : 20 orang	Terselenggaranya Sosialisasi Standar Sistem Manajemen Keamanan Informasi : 20 orang		Tersedianya alat keamanan informasi : 1 unit	Tersedianya alat keamanan informasi : 1 unit	

1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
		Tersedianya Peralatan Mini Komputer			Tersedianya Peralatan Mini Komputer : 2 jenis	Tersedianya Peralatan Mini Komputer : 2 jenis		Tersedianya sistem keamanan informasi : 2 paket	Tersedianya sistem keamanan informasi : 2 paket	
		Tersedianya Perangkat Sandi			Tersedianya Perangkat Sandi : 3 jenis	Tersedianya Perangkat Sandi : 3 jenis		Tersedianya Anti Virus : 1 paket	Tersedianya Anti Virus : 1 paket	
		Terpeliharanya Peralatan Komunikasi			Terpeliharanya Peralatan Komunikasi : 1 paket	Terpeliharanya Peralatan Komunikasi : 1 paket				
		Terselenggaranya Sosialisasi Penetration Testing			Terselenggaranya Sosialisasi Penetration Testing : 12 orang	Terselenggaranya Sosialisasi Penetration Testing : 12 orang				
		Terselenggaranya Sosialisasi Pengenalan Pengindraan			Terselenggaranya Sosialisasi Pengenalan Pengindraan : 10 orang	Terselenggaranya Sosialisasi Pengenalan Pengindraan : 10 orang				
		Penyusunan Regulasi TIK (Perwali dan SOP)								
		Peraturan Walikota mengenai SOP Pengelolaan Domain			Peraturan Walikota mengenai SOP Pengelolaan Domain : 1 dokumen	Peraturan Walikota mengenai SOP Pengelolaan Domain : 1 dokumen		Penyusunan Regulasi TIK : 3 dokumen		

1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
		Peraturan Walikota mengenai SOP Colocation Server Pengelolaan Hosting			Peraturan Walikota mengenai SOP Colocation Server Pengelolaan Hosting : 1 dokumen	Peraturan Walikota mengenai SOP Colocation Server Pengelolaan Hosting : 1 dokumen				
		Peraturan Walikota mengenai SOP Standarisasi Pembuatan Aplikasi			Peraturan Walikota mengenai SOP Standarisasi Pembuatan Aplikasi : 1 dokumen	Peraturan Walikota mengenai SOP Standarisasi Pembuatan Aplikasi : 1 dokumen				
		SK Tim Penyusunan Regulasi TIK (Perwali dan SOP)			SK Tim Penyusunan Regulasi TIK (Perwali dan SOP) : 1 dokumen	SK Tim Penyusunan Regulasi TIK (Perwali dan SOP) : 1 dokumen				
	Pemeliharaan dan Pengembangan CCTV dan Multimedia Kota Bogor									
		Terpeliharanya keamanan di lingkungan Balaikota dan Kawasan Publik			Terpeliharanya keamanan di lingkungan Balaikota dan Kawasan Publik : 40 titik	Terpeliharanya keamanan di lingkungan Balaikota dan Kawasan Publik : 40 titik		Terpeliharanya CCTV di Lingkungan Balaikota dan Kawasan Publik : 40 titik		

1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
		Terpeliharanya CCTV Lingkungan Balaikota			Terpeliharanya CCTV Lingkungan Balaikota : 8 unit	Terpeliharanya CCTV Lingkungan Balaikota : 8 unit		Terpeliharanya CCTV Lingkungan Balaikota : 8 unit	Terpeliharanya CCTV Lingkungan Balaikota : 2 unit	
		Terpeliharanya CCTV BGR			Terpeliharanya CCTV BGR : 2 unit	Terpeliharanya CCTV BGR : 2 unit		Terpeliharanya CCTV BGR : 2 unit		
		Tersedianya Outsourcing Operator CCTV			Tersedianya Outsourcing Operator CCTV : 2 orang	Tersedianya Outsourcing Operator CCTV : 2 orang		Tersedianya Outsourcing Operator CCTV : 2 orang	Tersedianya Outsourcing Operator CCTV : 2 orang	
		Tersedianya CCTV BGR			Tersedianya CCTV BGR : 2 unit	Tersedianya CCTV BGR : 2 unit		Tersedianya CCTV BGR : 2 unit		
								Terpeliharanya CCTV Lingkungan Balaikota : 2 unit	Terpeliharanya CCTV Lingkungan Balaikota : 2 unit	
								Terpeliharanya CCTV di lingkungan Kota Bogor : 8 unit	Terpeliharanya CCTV di lingkungan Kota Bogor : 8 unit	
		Penyelenggaraan Diseminasi dan Kemitraan Media Publik						Tersedianya CCTV Batas Kota Bogor : 3 titik	Tersedianya CCTV Batas Kota Bogor : 3 titik	

1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
		Terselenggaranya Diseminasi Informasi dan Kerjasama Media Publik			Terselenggaranya Diseminasi Informasi dan Kerjasama Media Publik : 70%	Terselenggaranya Diseminasi Informasi dan Kerjasama Media Publik : 70%		Terselenggaranya Diseminasi Informasi dan Kerjasama Media Publik :70%		
		Pembuatan Iklan Layanan Masyarakat dan Profile Wilayah			Pembuatan Iklan Layanan Masyarakat dan Profile Wilayah : 2 paket	Pembuatan Iklan Layanan Masyarakat dan Profile Wilayah : 2 paket		Penayangan Iklan di Media Sosial/Website /Koran/Radio : 70 tayang		
								Terbentuknya Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) 68 Kelurahan, 6 Kecamatan dan 1 Tingkat Kota : 75 kelompok	Terbentuknya Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) 68 Kelurahan, 6 Kecamatan dan 1 Tingkat Kota : 48 kelompok	
								Penyebaran Diseminasi Informasi Kebijakan Pemerintah Kepada Publik : 140 spanduk	Penyebaran Diseminasi Informasi Kebijakan Pemerintah Kepada Publik : 144 spanduk	
								Terselenggaranya Diseminasi dan Sosialisasi Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) : 1 kali	Terselenggaranya Diseminasi dan Sosialisasi Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) : 1 kali	

1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
								Lomba Karya Jurnalis : 1 kali	Lomba Karya Jurnalis : 1 kali	
	Pembangunan Wifi ruang publik	Tersedianya ruang publik yang memiliki wifi			Tersedianya ruang publik yang memiliki wifi : 10 (titik kelurahan)	Tersedianya ruang publik yang memiliki wifi : 10 (titik kelurahan)		Tersedianya ruang publik yang memiliki wifi : 10 titik	Tersedianya ruang publik yang memiliki wifi : 5 titik	
	Pengadaan Modul Aplikasi Pengaduan Masyarakat									
		Modul Aplikasi Pengaduan Masyarakat			Modul Aplikasi Pengaduan Masyarakat : 1 paket	Modul Aplikasi Pengaduan Masyarakat : 1 paket		Pengadaan modul Aplikasi Pengaduan masyarakat : 1 paket	Pengadaan modul Aplikasi Pengaduan masyarakat : 1 paket	
		Tersedianya Aplikasi Pengaduan Masyarakat Yang terintegrasi (NTPD 112 dan Call Center)			Tersedianya Aplikasi Pengaduan Masyarakat Yang terintegrasi (NTPD 112 dan Call Center) : 1 paket	Tersedianya Aplikasi Pengaduan Masyarakat Yang terintegrasi (NTPD 112 dan Call Center) : 1 paket		Pengembangan Aplikasi Pengaduan Masyarakat Yang terintegrasi (NTPD 112 dan Call Center) : 1 paket		
								Pengadaan Banner : 150 buah	Pengadaan Banner : 150 buah	
								Pengadaan Brosur/Leaflet : 5000 lembar	Pengadaan Brosur/Leaflet : 5000 lembar	

1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	Penyelenggaraan Ekosistem TIK dan Kerja sama Smartcity									
		e-Learning untuk Tingkat Taman Kanak-Kanak			e-Learning untuk Tingkat Taman Kanak-Kanak : 25 orang	e-Learning untuk Tingkat Taman Kanak-Kanak : 30 orang		e-Learning untuk tingkat Sekolah Dasar/SD : 30 Orang	e-Learning untuk tingkat Sekolah Dasar/SD : 30 Orang	
		Lomba Pembuatan Alat Peraga e-Learning Taman Kanak-Kanak			Lomba Pembuatan Alat Peraga e-Learning Taman Kanak-Kanak : 25 orang	Lomba Pembuatan Alat Peraga e-Learning Taman Kanak-Kanak : 30 orang		Lomba Pembuatan Alat Peraga e-Learning tingkat Sekolah Dasar/SD : 30 Orang	Lomba Pembuatan Alat Peraga e-Learning tingkat Sekolah Dasar/SD : 30 Orang	
		Kampanye Literasi TIK			Kampanye Literasi TIK : 25 orang	Kampanye Literasi TIK : 30 orang				
		SK Tim Panitia Lomba			SK Tim Panitia Lomba: 1 dokumen	SK Tim Panitia Lomba: 1 dokumen				
	Promosi dan Sosialisasi Layanan Publik berbasis elektronik	SDM Pengelola Layanan Publik Berbasis Elektronik			SDM Pengelola Layanan Publik Berbasis Elektronik : 70 Orang	SDM Pengelola Layanan Publik Berbasis Elektronik : 64 Orang		Organisasi Perangkat Daerah memahami layanan publik yang berbasis Elektronik : 30 OPD	Organisasi Perangkat Daerah memahami layanan publik yang berbasis Elektronik : 30 OPD	

1				2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
				Penilaian Index E-Government Indonesia							Nilai Index e-Government Indonesia & Nilai SPBE : 3,13 index	Nilai Index e-Government Indonesia & Nilai SPBE : 3,10 index	
											Peserta yang Mengikuti Kegiatan PEGI dan SPBE : 150 orang	Peserta yang Mengikuti Kegiatan PEGI dan SPBE : 130 orang	
				Penyelenggaraan Statistik Sektoral							Tersedianya data IPM mulai dari tingkat kelurahan sampai kota untuk kepentingan perencanaan pembangunan : 1 paket		
											Terselenggaranya Forum Data Statistik Sektoral : 5 kali	Terselenggaranya Forum Data Statistik Sektoral : 5 kali	

1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi	Ketersediaan SDM yang mempunyai kompetensi di bidang TIK (Orang/PD)	2 orang	2 orang			100%			100%
	Penyelenggaraan Pelatihan bagi SDM TIK seluruh OPD	Terlatihnya TIK bagi para SDM di setiap OPD			Terlatihnya TIK bagi para SDM di setiap OPD : 74 orang	Terlatihnya TIK bagi para SDM di setiap OPD : 74 orang		Terlatihnya TIK bagi para SDM di setiap OPD : 74 orang	Terlatihnya TIK bagi para SDM di setiap OPD : 74 orang	
	Integrasi Pengelolaan Teknologi Informasi dan e-Government Pemerintah Kota Bogor	Tersedianya Buku Rencana Induk Pengembangan e-Government			Tersedianya Buku Rencana Induk Pengembangan e-Government : 1 dokumen	Tersedianya Buku Rencana Induk Pengembangan e-Government : 1 dokumen				
	Pelatihan Aplikasi Pengaduan Masyarakat	Terlatihnya TIK (Aplikasi Pengaduan Masyarakat) di setiap Perangkat Daerah			Terlatihnya TIK (Aplikasi Pengaduan Masyarakat) di setiap Perangkat Daerah : 100 orang	Terlatihnya TIK (Aplikasi Pengaduan Masyarakat) di setiap Perangkat Daerah : 100 orang		Terlatihnya Peserta Pelatihan Aplikasi Pengaduan Masyarakat : 100 orang	Terlatihnya Peserta Pelatihan Aplikasi Pengaduan Masyarakat : 100 orang	

2.2. ANALISIS KINERJA PELAYANAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA BOGOR

Berdasarkan hasil analisis capaian indikator anggaran belanja tahun 2019, Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bogor telah tercapai baik dengan tingkat capaian 96,21% (sembilan puluh enam koma dua puluh satu persen).

Adapun Kinerja pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bogor dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2019 dan proyeksi tahun 2021 dapat dilihat pada tabel 2.2.1.

No.	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra				realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2018 (n-2)	Tahun 2019 (n-1)	Tahun 2020 (n)	Tahun 2021 (n+2)	Tahun 2018 (n-2)	Tahun 2019 (n-1)	Tahun 2020 (n)	Tahun 2021 (n+2)	
(1)	(2)	(3)	(4)			(6)	(7)					(12)
1	indeks e-government			3,21	3,29	-	-	3,03	3,10	-	-	
2	Persentase Penyediaan infrastruktur Jaringan Internet dan intranet menggunakan Fiber Optik			68%	80%	-	-	63,8%	66%	-	-	
3	Persentase CCTV yang diintegrasikan			90%	96%	-	-	90%	96%	-	-	
4	Persentase Integrasi Data SIM			18,45%	20,39%	-	-	18,45%	20,59%	-	-	
5	Persentase layanan pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti Perangkat Daerah terkait			65%	70%	-	-	80,14%	80,14%	-	-	
6	Nilai Akuntabilitas kinerja Dinas			B	B	B	BB	BB	BB	-	-	
7	Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan yang ditindaklanjuti			100%	100%	90	90	100%	100%	-	-	

2.3. ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA BOGOR

Diskominfo Kota Bogor sebagai Perangkat Teknis Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintah daerah bidang Komunikasi dan Informatika Kota Bogor sesuai dengan tugas dan fungsinya dihadapkan kepada beberapa tantangan dan permasalahan pokok yang bersumber dari internal maupun secara eksternal antara lain:

1. Penyediaan Ruang Server yang Layak;
2. Penyediaan layanan pusat penanggulangan bencana (DRC);
3. Kurangnya SDM TIK yang kompeten;

4. Lokasi penempatan ruang server masih belum memenuhi standar;
5. Layanan konektivitas dan jaringan belum stabil;
6. Penerimaan pengaduan non kedaruratan (call center) hanya berlaku di jam kerja dan hari kerja sedangkan layanan kedaruratan (NTPD) beroperasi selama 24 jam setiap hari selama setahun;
7. Belum menjadi satu-satunya sumber data dan informasi statistik sektoral;
8. Sistem Informasi yang dibangun di Perangkat daerah belum sesuai standar sesuai Peraturan Wali Kota;
9. Terbatasnya pemahaman aparatur dan masyarakat terhadap perkembangan TIK yang cukup pesat.

Dari identifikasi terhadap permasalahan yang dihadapi oleh Diskominfo Kota Bogor dalam pelaksanaan tugas dan fungsi yang diemban sebagai organisasi yang berperan dalam pelaksanaan perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah, maka peningkatan kinerja organisasi melalui kegiatan tahunan yang dilaksanakannya menjadi hal yang mutlak dilakukan.

Untuk menghasilkan capaian kinerja yang sesuai dengan harapan, maka strategi pemecahan masalah yang dapat dilakukan antara lain:

1. Meningkatkan tata kelola kelembagaan;
2. Meningkatkan kapasitas infrastruktur TIK;
3. Meningkatkan Layanan Interoperabilitas;
4. Kerjasama Informasi dengan Media Massa;
5. Menyediakan sarana dan prasarana keamanan informasi;
6. Mengatasi kesenjangan waktu pelayanan melalui integrasi layanan pengaduan berbasis elektronik;
7. Meningkatkan kerjasama pengelolaan satu data statistik sektoral yang berkualitas melalui komunikasi dan pertukaran data;
8. Menciptakan tata kelola profesional dengan tertib administrasi dan pemenuhan kebutuhan dasar administrasi perkantoran.
9. Mengintegrasikan sistem informasi dan database Perangkat Daerah;

10. Tersedianya media informasi dan komunikasi untuk didayagunakan;
11. Meningkatkan kualitas pelayanan publik;
12. Mengembangkan muatan *e-Government*.

2.4. REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD

Rancangan awal RKPD merupakan dokumen yang disusun sebagai bagian dari proses penyusunan RKPD sebagai panduan kepada seluruh Perangkat Daerah dalam menyusun rancangan Renja Perangkat Daerah dalam kurun waktu 1 (satu) tahun yang disusun menggunakan metode teknokratik dan partisipatif.

Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bogor pada tahun 2021 lebih memaksimalkan dan meningkatkan peran Dinas dalam hal pengelolaan Komunikasi dan Informatika sebagaimana terlihat pada tabel 2.4. berikut ini:

Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2021 Kota Bogor

Nama Perangkat Daerah : Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bogor

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Kota Bogor	Persentase pemenuhan Kebutuhan operasional perangkat daerah	85%	1.415.000.000,00						
2	Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Kota Bogor	Nilai Hasil Evaluasi LKIP Perangkat Daerah	BB	30.000.000,00						
3	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kota Bogor	Persentase pemenuhan Kebutuhan operasional perangkat daerah	100%	1.342.000.000,00						
4	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	Kota Bogor	Hasil Penilaian SPBE	2,92 Indeks	9.600.412.000,00						
			Persentase data urusan pemerintah daerah Kota Bogor yang terintegrasi	21%							

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
			Persentase Keterbukaan Informasi public	100%							
			Persentase Pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti oleh PD sesuai SOP	90%							
5	Pengembangan Data dan Informasi	Kota Bogor	Prosentase PD yang menyediakan data dan informasi melalui media elektronik	60%	142.342.500,00						
6	Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Kota Bogor	Persentase ketersediaan data statistik sektoral	73%	547.129.000,00						
7	Penyelenggaraan Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah	Kota Bogor	Indeks Keamanan Informasi (Indeks KAMI)	1 Indeks	134.538.000,00						

2.5. PENELAHAAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

Diskominfo Kota Bogor akan mengkaji dan menambah usulan program dan kegiatan dari masyarakat terkait kebutuhan dan harapan pemangku kepentingan maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi Perangkat Daerah dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kecamatan terhadap prioritas dan sasaran pelayanan serta kebutuhan pembangunan tahun yang direncanakan, sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

Diskominfo Kota Bogor dalam pembuatan program kegiatan berusaha untuk memperhatikan usulan-usulan dalam pelaksanaan Musrenbang Kecamatan sedangkan untuk usulan kegiatan yang bukan merupakan tugas dan fungsi Diskominfo Kota Bogor maka usulan kegiatan tersebut diarahkan kepada Dinas yang terkait.

Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2021 Kota Bogor

Nama Perangkat Daerah : Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bogor

No	Program	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		NIHIL			

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA BOGOR

3.1. TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Dalam rangka menciptakan masyarakat informasi yang sejahtera, berbudaya dan berbasis pengetahuan, maka diperlukan arah pembangunan yang jelas dibidang komunikasi dan informatika. Informasi yang dikelola dengan baik akan menghasilkan pengetahuan yang sangat khas bagi suatu negara, sesuai dengan kondisi alam dan budaya, sehingga merupakan aset yang sangat berharga.

Peran pemerintah sangat diharapkan dalam upaya terbentuknya masyarakat Indonesia yang informatif. Dengan arah kebijakan yang tepat, diharapkan bidang komunikasi dan informatika akan sangat berperan dalam melakukan transformasi menuju ke masyarakat Indonesia yang informatif.

Dalam konteks ini Kementerian Komunikasi dan Informatika memiliki kompetensi sebagai perumus kebijakan nasional, kebijakan pelaksanaan, dan kebijakan teknis serta pelaksanaan kebijakan di bidang komunikasi dan informatika.

Sebagai leading sektor dibidang komunikasi dan informatika, Kementerian Komunikasi dan Informatika akan berfokus pada upaya mendukung pencapaian kedaulatan pangan, kecukupan energi, pengelolaan sumber daya maritim dan kelautan, pembangunan infrastruktur, percepatan pembangunan daerah perbatasan, dan peningkatan sektor pariwisata dan industri, berlandaskan keunggulan sumber daya manusia dan kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bogor telah merancang dan menyusun berbagai program/kegiatan berazaskan pada peningkatan jangkauan pelayanan komunikasi, informatika, statistik dan persandian sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

3.2. TUJUAN DAN SASARAN RENJA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA BOGOR

A. Tujuan Renja

Renja Diskominfo Kota Bogor Tahun 2021 disusun dengan maksud untuk menjadikan acuan perencanaan program dan kegiatan tahun 2021 sebagai berikut:

- a. mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan dalam penyusunan program dan kegiatan di Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bogor;
- b. sebagai dasar dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dibidang Komunikasi dan Informatika Kota Bogor untuk Tahun Anggaran 2021.

Adapun tujuan yang ingin dicapai dengan disusunnya Renja Diskominfo Kota Bogor Tahun 2021 yaitu pemanfaatan TIK dan penyebaran informasi yang efektif untuk mendukung terwujudnya ketatalaksanaan Pemerintah Daerah yang berkualitas.

B. Sasaran Renja

Sasaran menentukan keberhasilan tujuan yang diharapkan. Sasaran Renja Diskominfo Kota Bogor berdasarkan Renstra yang akan dicapai adalah sebagai berikut:

1. Penyelenggaraan pemerintahan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dalam rangka penerapan konsep *Good Governance*;
2. Tersedianya data statistik sektoral;
3. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas;

3.3. PROGRAM DAN KEGIATAN

Faktor utama disusunnya program/kegiatan dalam renja ini adalah demi pencapaian visi misi Kepala Daerah dan Perangkat Daerah. Selain itu faktor penunjang lainnya adalah pencapaian target renstra Perangkat Daerah dan wujud nyata pengimplementasian tugas dan fungsi Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Adapun program-program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2021 terdiri dari:

1. Program Penunjang urusan Pemerintahan daerah
 - 1) Administrasi Keuangan;
 - 2) Administrasi Umum;
 - 3) Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
2. Program Aplikasi informatika
 - 1) Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
 - 2) Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan Oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
3. Program Informasi dan komunikasi publik
 - 1) Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
4. Program Penyelenggaraan statistik sektoral
 - 1) Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota.
5. Program Penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi
 - 1) Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

Dari 5 (lima) program dan 8 (delapan) kegiatan tersebut, adapun rincian rencana kegiatan per program terlampir pada tabel Renja Diskominfo Kota Bogor Tahun 2021.

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bogor pada tahun 2021 mempunyai 5 (lima) program dan 8 (delapan) kegiatan. Program yang mendukung dalam pencapaian sasaran ada 4 (empat) program sedangkan 1 (satu) program sebagai pendukung. Program pendukung yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, sedangkan program yang mendukung capaian sasaran yaitu Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Program Pengelolaan Aplikasi Informatika, Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral, Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi. Adapun untuk pendanaan program dan kegiatan pada tahun 2021 sebesar Rp.23.917.490.456,00 (dua puluh tiga milyar sembilan ratus tujuh belas juta empat ratus sembilan puluh ribu empat ratus lima puluh enam rupiah).

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Rencana Pendanaan (Rp)	Bidang Pengampu
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA				23,917,490,456	
I	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK				4,460,831,000	
1	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota				4,460,831,000	
	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Kota Bogor, Bogor Tengah, Pabaton	Tersedianya APK Mobil Smartcity	1 paket	37,680,000	Bidang KIP
	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Kota Bogor, Bogor Tengah, Pabaton	Forum Perhumas Honorarium Non ASN (Tenaga Pengelola Media Sosial 2 orang Kegiatan Bakohumas TK. Kota Bogor Pengelola Data IT Tersedianya Booklet dan Leaflet	1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket	290,698,000	

	Pelayanan Informasi Publik	Kota Bogor, Bogor Tengah, Pabaton	Kuisisioner dan Pelaksanaan Wawancara PPID Pembantu Laporan Penyelenggaraan Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Tersedianya Operator Pengelola Layanan Pengaduan Masyarakat Tersedianya Pemeliharaan Aplikasi Sibadra Tersedianya Pengelolaan Layanan Pengaduan Masyarakat Workshop KIP	44 Lembaga 1 Dokumen 13 Orang 1 Paket 1 Paket 1 Kali	1,031,104,500	
	Layanan Hubungan Media	Kota Bogor, Bogor Tengah, Pabaton	Advertorial dan Analisis Media Cetak, Elektronik dan Online Penyebaran Informasi Kebijakan Pemerintah Melalui Media Spanduk Perjalanan Dinas/Uang Saku Jumpa Pers Wartawan Terbinanya Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) yang Kreatif dan Inovatif Tersebaranya Informasi Kebijakan Pemerintah Daerah Tersedianya Konten Publikasi Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) Pelaksana Penyebaran Informasi Terselenggaranya Lomba Kreatif Kelompok Informasi Masyarakat	1 Tahun 240 Meter 1 Tahun 55 Kelompok 4 Media Sosial 3 Konten 11 Orang 2 Lomba	3,101,348,500	
II	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA				8,193,030,000	
1	Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan Oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota				4,431,286,000	
	Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi	Kota Bogor, Bogor Tengah, Pabaton	Terpeliharanya keberlangsungan Server Domain Kota Bogor Tersedianya keberlangsungan pengelolaan website Kota Bogor	1 paket 12 Bulan	49,730,000	Bidang E-Gov
	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Outsourcing Jaringan Terpeliharanya Grounding Listrik dan erester Perangkat Daerah dan Kelurahan	1 Paket 7 Titik 146 Titik 60 Titik 400 Mbps 10 Titik 5 Titik	4,381,556,000	Bidang TI

			Terpeliharanya jaringan intranet dan internet (backbone) dan tertatanya jaringan intranet LAN pada Perangkat Daerah se Kota Bogor Terpeliharanya wifi ruang publik Tersedianya bandwidth internet se - Kota Bogor Tersedianya jaringan Fiber Optik di Perangkat Daerah Tersedianya ruang publik yang memiliki wifi			
2	Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota				3,761,744,000	
	Penatalaksanaan dan Pengawasan egovernment dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi	Kota Bogor, Bogor Tengah, Pabaton	Hak Akses terhadap 103 Aplikasi dan akan terus bertambah setiap tahunnya Nilai Indeks Penyelenggaraan SPBE	2 Hak Akses 2.92 Indeks	24,255,000	Bidang E-gov
	Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik	Kota Bogor, Bogor Tengah, Pabaton	Sosialisasi/Diseminasi yang dilaksanakan per tahun	3 Pertemuan	106,170,000	Bidang E-gov
	Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Outsourcing operator CCTV Terpeliharanya jumlah titik CCTV di Lingkungan Kota Bogor Tersedianya CCTV	1 paket 69 Titik 3 Titik	349,937,000	
	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Kota Bogor, Bogor Tengah, Pabaton	Aplikasi Layanan Government yang dibuatkan/ dikembangkan/ dipelihara oleh Diskominfo Terpeliharanya perangkat pembangunan dan pengembangan aplikasi Tersedianya lisensi hak pakai Cpanel Tersedianya lisensi hak pakai webmail Kota Bogor Tersedianya outsourcing Desainer Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi Tersedianya outsourcing Programmer Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi	3 Aplikasi 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket	1,197,665,000	Bidang E-Gov
	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	Kota Bogor, Bogor Tengah, Pabaton	Tersedianya Paket Pengembangan Datawarehouse	1 paket	39,475,000	Bidang E-Gov

	Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya anjungan promosi Tersedianya reklame untuk promosi smart city	5 set 3 paket	287,400,000	
	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Kota Bogor, Bogor Tengah, Pabaton	Terpeliharanya perangkat multimedia Bogor Green Room/Command Center Tersedianya outsourcing operator Bogor Green Room	1 paket 1 paket	1,000,000,000	
III	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH				10,489,870,456	
1	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				13,020,000	
	Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah	Kota Bogor, Bogor Tengah, Pabaton	Dokumen Rencana Kerja	1 dokumen	2,500,000	Sekretariat
	Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah	Kota Bogor, Bogor Tengah, Pabaton	Dokumen LAKIP Dokumen LKPJ Dokumen LPPD	1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen	10,520,000	
2	Administrasi Keuangan				8,656,383,956	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Bogor, Bogor Tengah, Pabaton	Terpenuhinya Gaji dan Tunjangan Pegawai	1 tahun	8,656,383,956	Sekretariat
3	Administrasi Umum				1,820,466,500	Sekretariat
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Bogor, Bogor Tengah, Pabaton	tersedianya jasa komunikasi, listrik dan air	12 bulan	89,000,000	
	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Kota Bogor, Bogor Tengah, Pabaton	tersedianya kebutuhan jasa kebersihan kantor	2 orang	31,200,000	
	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Kota Bogor, Bogor Tengah, Pabaton	tersedianya ATK	12 bulan	102,874,150	
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kota Bogor, Bogor Tengah, Pabaton	tersedianya barang cetakan dan penggandaan	1 paket	25,429,400	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Bogor, Bogor Tengah, Pabaton	tersedianya kebutuhan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	1 paket	13,880,000	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Bogor, Bogor Tengah, Pabaton	tersedianya jasa pengemudi tersedianya kebutuhan peralatan kebersihan dan bahan pembersih	2 orang 1 paket 12 bulan	55,929,500	

			tersedianya surat kabar			
	Penyediaan Makanan dan Minuman	Kota Bogor, Bogor Tengah, Pabaton	tersedianya kebutuhan makan dan minuman kantor	1 paket	192,150,000	
	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	tersedianya anggaran perjalanan dinas luar daerah	1 paket	728,746,450	
	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Kota Bogor, Bogor Tengah, Paledang	tersedianya perlengkapan gedung kantor	1 paket	64,366,500	
	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Kota Bogor, Bogor Tengah, Pabaton	tersedianya peralatan gedung kantor	1 paket	225,173,500	
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Kota Bogor, Bogor Tengah, Pabaton	belanja pajak kendaraan bermotor Terpeliharanya Mobil Dinas tersedianya Bahan Bakar Minyak	13 unit 1 paket 12 bulan	149,800,000	
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Kota Bogor, Bogor Tengah, Pabaton	terpeliharanya perlengkapan gedung kantor	1 paket	37,500,000	
	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor	Kota Bogor, Bogor Tengah, Pabaton	peningkatan kualitas sarana dan prasarana gedung kantor	3 paket	104,417,000	
IV	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL				547,129,000	
1	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota				547,129,000	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan diseminasi Data Statistik Sektoral	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Terselenggaranya satu data statistik sektoral	2 paket	186,329,000	Bidang Statistik
	Peningkatan kapasitas SDM Pemda dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	Kota Bogor, Bogor Tengah, Pabaton	Tersedianya hasil produk Data Statistik Sektoral yang dipublikasikan	2 media	179,493,000	
	Membangun Metadata Statistik Sektoral	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersusunnya Buku Induk Statistik Tersusunnya Indeks Ketahanan Keluarga	1 paket 1 paket	181,307,000	
V	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI				226,630,000	
1	Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota				226,630,000	
	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan	Kota Bogor, Bogor Tengah, Pabaton	Penyelenggaraan Audit Sistem Elektronik per tahun dengan pertimbangan bahwa	1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 150	200,515,000	Bidang TI

	Non Elektronik		setiap tahunnya akan ada penambahan dan pengembangan aplikasi Tersedianya Firewall Tersedianya Sistem Anti Virus Tersedianya Software berlisensi Tersosialisasinya Keamanan Informasi	Orang		
	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kota Bogor, Bogor Tengah, Pabaton	Tersedianya Dokumen Sistem Keamanan Informasi	1 Paket	26,115,000	

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bogor Tahun 2021 merupakan dokumen perencanaan yang dipergunakan sebagai pedoman bersama dalam menjalankan tugas dan fungsi dinas serta memberikan arah bagi pelaksanaan program dan kegiatan dan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran Tahun 2021, yang memuat rancangan kerangka prioritas pembangunan, rencana kerja dan pendanaannya guna mendukung tercapainya target perencanaan pembangunan daerah yang menyeluruh dan lebih terintegrasi dan terkendali pelaksanaannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bogor Tahun 2021 mengacu kepada Rencana Strategis Dinas Komunikasi, dan Informatika Kota Bogor Tahun 2019-2024 yang memuat hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan tahun sebelumnya, memuat permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bogor dalam pelaksanaan program dan kegiatan, serta telah mengakomodir usulan-usulan dari para pemangku kepentingan.

Optimalisasi dalam pelaksanaan isi Renja merupakan hal penting yang perlu diupayakan dalam rangka mewujudkan kelancaran pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan sesuai dengan kewenangan urusan komunikasi dan informatika yang diemban oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bogor sebagai salah satu Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Bogor sehingga diharapkan dapat tercapai tujuan pembangunan daerah Kota Bogor Tahun 2021.

Keberhasilan pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bogor Tahun 2021 sangat ditentukan oleh kesiapan kelembagaan, ketatalaksanaan, SDM dan sumber pendanaannya serta komitmen semua jajaran Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bogor dalam melaksanakan dan mengimplementasikannya dengan akuntabel serta senantiasa berorientasi pada peningkatan kinerja lembaga, dan kinerja pegawai, sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing.

LAMPIRAN

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah tahun 2021 dan Prakiraan Maju Tahun 2022

**Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah tahun 2021 dan Prakiraan Maju Tahun 2022
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA BOGOR**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan			Rencana Tahun 2021			Pagu Indikatif (Rp)	Sumber dana	Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022			
		Capaian Program	Keluaran Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi output Kegiatan	Target Capaian Kinerja					Tolak Ukur	Target	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	
						Program	Keluaran Kegiatan							Hasil Kegiatan
2														
2	16							23.917.490.456					36.895.000.000	
2	16	02						4.460.831.000					5.230.000.000	
2	16	02	2.01					4.460.831.000					5.230.000.000	
2	16	02	2.01	04	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Tersedianya APK Mobil Smartcity	Kota Bogor, Bogor Tengah, Pabaton		1 paket		37.680.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		43.000.000
2	16	02	2.01	05	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Forum Perhumas Honorarium Non ASN (Tenaga Pengelola Media Sosial 2 orang Kegiatan Bakohumas TK. Kota Bogor Pengelola Data IT Tersedianya Booklet dan Leaflet	Kota Bogor, Bogor Tengah, Pabaton		1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket		290.698.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		1.417.000.000
2	16	02	2.01	06	Pelayanan Informasi Publik	Kuisisioner dan Pelaksanaan Wawancara PPID Pembantu Laporan Penyelenggaraan Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Tersedianya Operator Pengelola Layanan Pengaduan Masyarakat Tersedianya Pemeliharaan Aplikasi Sibadra Tersedianya Pengelolaan Layanan Pengaduan Masyarakat Workshop KIP	Kota Bogor, Bogor Tengah, Pabaton		44 Lembaga 1 Dokumen 13 Orang 1 Paket 1 Paket 1 Kali		1.031.104.500	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		2.670.000.000
2	16	02	2.01	07	Layanan Hubungan Media	Advertorial dan Analisis Media Cetak, Elektronik dan Online Penyebaran Informasi Kebijakan Pemerintah Melalui Media Spanduk Perjalanan Dinas/Uang Saku Jumpa Pers Wartawan Terbinanya Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) yang Kreatif dan Inovatif Tersebaranya Informasi Kebijakan Pemerintah Daerah Tersedianya Konten Publikasi Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) Pelaksana Penyebaran Informasi Terselenggaranya Lomba Kreatif Kelompok Informasi Masyarakat	Kota Bogor, Bogor Tengah, Pabaton		1 Tahun 240 Meter 1 Tahun 55 Kelompok 4 Media Sosial 3 Konten 11 Orang 2 Lomba		3.101.348.500	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		1.100.000.000

2	16	03			PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA					8.193.030.000					18.922.000.000	
2	16	03	2.01		Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan Oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupa					4.431.286.000					10.350.000.000	
2	16	03	2.01	02	Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi		Terpeliharanya keberlangsungan Server Domain Kota Bogor Tersedianya keberlangsungan pengelolaan website Kota Bogor		Kota Bogor, Bogor Tengah, Pabaton		1 paket 12 Bulan		49.730.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		500.000.000
2	16	03	2.01	03	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah		Outsourcing Jaringan Terpeliharanya Grounding Listrik dan erester Perangkat Daerah dan Kelurahan Terpeliharanya jaringan intranet dan internet (backbone) dan tertatanya jaringan intranet LAN pada Perangkat Daerah se Kota Bogor Terpeliharanya wifi ruang publik Tersedianya bandwidth internet se - Kota Bogor Tersedianya jaringan Fiber Optik di Perangkat Daerah Tersedianya ruang publik yang memiliki wifi		Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 Paket 7 Titik 146 Titik 60 Titik 400 Mbps 10 Titik 5 Titik		4.381.556.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		9.850.000.000
2	16	03	2.02		Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota					3.761.744.000					8.572.000.000	
2	16	03	2.02	01	Penatalaksanaan dan Pengawasan egovernment dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi		Hak Akses terhadap 103 Aplikasi dan akan terus bertambah setiap tahunnya Nilai Indeks Penyelenggaraan SPBE		Kota Bogor, Bogor Tengah, Pabaton		2 Hak Akses 2.92 Indeks		24.255.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		125.000.000
2	16	03	2.02	02	Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik		Sosialisasi/Diseminasi yang dilaksanakan per tahun		Kota Bogor, Bogor Tengah, Pabaton		3 Pertemuan		106.170.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		107.000.000
2	16	03	2.02	03	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah		Terpeliharanya perangkat Data Recovery Center (DRC) Terpeliharanya Perangkat ruang kendali jaringan dan server Tersedianya Data Recovery Center (DRC) Tersedianya outsourcing ruang kendali jaringan dan server Tersedianya perangkat ruang kendali jaringan dan server		Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 2 Paket		681.874.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		2.650.000.000

2	16	03	2.02	04	Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah		Terkelolanya dan terpeliharanya perangkat dan aplikasi teleconference		Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 Paket		74.968.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			200.000.000
2	16	03	2.02	06	Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik		Outsourcing operator CCTV Terpeliharanya jumlah titik CCTV di Lingkungan Kota Bogor Tersedianya CCTV		Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 paket 69 Titik 3 Titik		349.937.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			1.500.000.000
2	16	03	2.02	07	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik		Aplikasi Layanan Government yang dibuatkan/ dikembangkan/ dipelihara oleh Diskominfo Terpeliharanya perangkat pembangunan dan pengembangan aplikasi Tersedianya lisensi hak pakai Cpanel Tersedianya lisensi hak pakai webmail Kota Bogor Tersedianya outsourcing Desainer Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi Tersedianya outsourcing Programmer Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi		Kota Bogor, Bogor Tengah, Pabaton		3 Aplikasi 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket		1.197.665.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			1.200.000.000
2	16	03	2.02	08	Penyelenggaran Sistem Penghubung Layanan Pemerintah		Tersedianya Paket Pengembangan Datawarehouse		Kota Bogor, Bogor Tengah, Pabaton		1 paket		39.475.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			800.000.000
2	16	03	2.02	09	Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas		Tersedianya anjungan promosi Tersedianya reklame untuk promosi smart city		Semua Kabupaten/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		5 set 3 paket		287.400.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			940.000.000
2	16	03	2.02	10	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah		Terpeliharanya perangkat multimedia Bogor Green Room/Command Center Tersedianya outsourcing operator Bogor Green Room		Kota Bogor, Bogor Tengah, Pabaton		1 paket 1 paket		1.000.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			1.050.000.000

2	16	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH					10.489.870.456					6.943.000.000
2	16	01	2.01		Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					13.020.000					30.000.000
2	16	01	2.01	01	Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah	Dokumen Rencana Kerja		Kota Bogor, Bogor Tengah, Pabaton		1 dokumen		2.500.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		
2	16	01	2.01	03	Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah	Dokumen LAKIP Dokumen LKPJ Dokumen LPPD		Kota Bogor, Bogor Tengah, Pabaton		1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen		10.520.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		
2	16	01	2.02		Administrasi Keuangan							8.656.383.956			
2	16	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terpenuhinya Gaji dan Tunjangan Pegawai		Kota Bogor, Bogor Tengah, Pabaton		1 tahun		8.656.383.956	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		
2	16	01	2.03		Administrasi Umum							1.820.466.500			6.913.000.000
2	16	01	2.03	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	tersedianya jasa komunikasi, listrik dan air		Kota Bogor, Bogor Tengah, Pabaton		12 bulan		89.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		
2	16	01	2.03	08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	tersedianya kebutuhan jasa kebersihan kantor		Kota Bogor, Bogor Tengah, Pabaton		2 orang		31.200.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		
2	16	01	2.03	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	tersedianya ATK		Kota Bogor, Bogor Tengah, Pabaton		12 bulan		102.874.150	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		
2	16	01	2.03	11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	tersedianya barang cetakan dan penggandaan		Kota Bogor, Bogor Tengah, Pabaton		1 paket		25.429.400	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		
2	16	01	2.03	12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	tersedianya kebutuhan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor		Kota Bogor, Bogor Tengah, Pabaton		1 paket		13.880.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		
2	16	01	2.03	16	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	tersedianya jasa pengemudi tersedianya kebutuhan peralatan kebersihan dan bahan pembersih tersedianya surat kabar		Kota Bogor, Bogor Tengah, Pabaton		2 orang 1 paket 12 bulan		55.929.500	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		
2	16	01	2.03	17	Penyediaan Makanan dan Minuman	tersedianya kebutuhan makan dan minuman kantor		Kota Bogor, Bogor Tengah, Pabaton		1 paket		192.150.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		
2	16	01	2.03	18	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	tersedianya anggaran perjalanan dinas luar daerah		Semua Kabupaten/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 paket		728.746.450	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		
2	16	01	2.03	22	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	tersedianya perlengkapan gedung kantor		Kota Bogor, Bogor Tengah, Paledang		1 paket		64.366.500	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		

